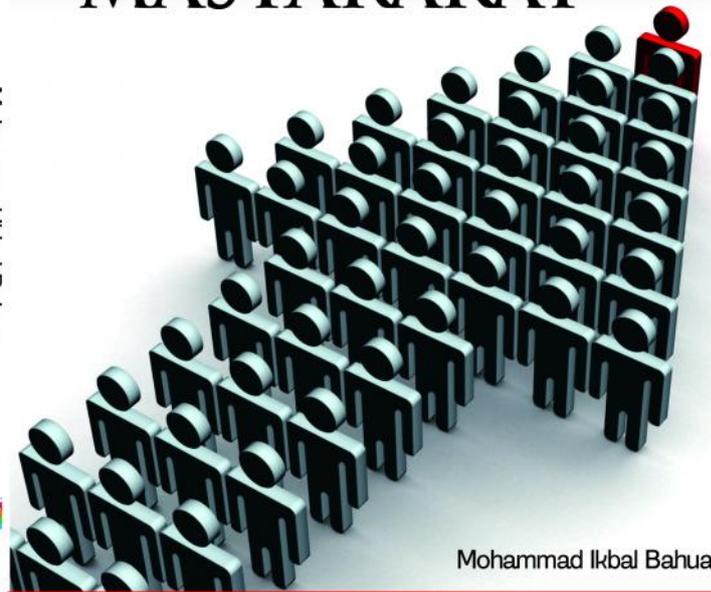


# PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMBANGUNAN MASYARAKAT



Mohammad Ikbal Bahua

Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat

Mohammad Ikbal Bahua



# Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat

Mohammad Ikbal Bahua



Gorontalo, 2018

**IP.025.05.2018**

---

Perencanaan Partisipatif  
Pembangunan Masyarakat

Mohammad Ikbal Bahua

Pertama kali diterbitkan oleh **Ideas Publishing**, Mei 2018

Alamat: Jalan Ir. Joesoef Dalie (Ex Pangeran Hidayat)

No. 110 Kota Gorontalo

Surel: infoideaspublishing@gmail.com

Anggota Ikapi, No. 0001/ikapi/gtlo/II/17

ISBN: 978-602-5878-02-2

Penyunting: Mira Mirnawati

Penata Letak: Yulin Kamumu

Sampul: Sabiq

---

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

## Prakata

Puji dan syukur dihaturkan ke hadirat Allah Swt., karena hanya atas kodrat dan iradat-Nya jumlah penyusunan buku *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat* ini dapat penulis selesaikan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw, beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau dengan ikutan yang baik hingga hari akhir.

Pembangunan masyarakat merupakan unsur utama suatu Negara dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui berbagai program pembangunan yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat secara berkelanjutan. Buku ini membahas secara ringkas proses perencanaan partisipatif dalam pembangunan masyarakat serta berbagai paradigma tentang pembangunan masyarakat itu sendiri yang didasarkan pada berbagai mazhab dan perkembangan teori pembangunan.

Buku ini terdiri atas lima bab. Bab I perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat. Bab II memaparkan tentang strategi perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat. Bab III membahas tentang prinsip perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat. Bab IV memaparkan tentang mazhab dan paradigma perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat. Bab V memaparkan prosedur perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat, bab ini merupakan penutup dari berbagai bab-bab di atas.

Buku ini berguna bagi kalangan birokrat, mahasiswa, akademisi dan kalangan masyarakat umumnya, karena berbagai konsep pembangunan, perencanaan dan partisipatif diuraikan pada buku ini, walaupun singkat, tetapi dapat dijadikan bahan pertimbangan kebijakan untuk merencanakan pembangunan masyarakat.

Akhir kata, penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan buku ini dari awal sampai akhir. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan. Tak lupa

pulu terima kasih kepada ideas publishing yang telah menerbitkan naskah ini menjadi buku. Semoga Allah Swt., senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.

Gorontalo, Mei 2018

Penulis



# Daftar Isi

<b>Prakata</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>vii</b>
<b>Bab I Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat</b> .....	<b>1</b>
A. Pengertian Perencanaan .....	1
B. Pengertian Partisipatif .....	4
C. Pengertian Pembangunan .....	7
D. Pengertian Masyarakat Organisasi .....	9
E. Perencanaan Pembangunan Masyarakat .....	11
<b>Bab II Strategi Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat</b> .....	<b>15</b>
<b>Bab III Prinsip Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat</b> .....	<b>19</b>
<b>Bab IV Mazhab dan Paradigma Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat</b> .....	<b>21</b>
A. Jenis Mazhab Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat .....	21
1. Mazhab Modernisme dan Post-Modernisme Pembangunan Masyarakat .....	21

2. Tinjauan Historis Gagasan Post- Modernisme.....	27
3. Kritik Mazhab/Paradigma Developmentalisme Modernisme.....	31
4. Persyaratan Post-Modernisme sebagai Pendekatan Transformasi Masyarakat .....	39
B. Pergeseran Paradigma Pembangunan Masyarakat .....	44
1. Paradigma Pembangunan Masyarakat .....	44
2. Peta Pergeseran Paradigma Pembangunan ..	53

## **Bab V** **Prosedur Perencanaan Partisipatif**

<b>Pembangunan Masyarakat .....</b>	<b>67</b>
A. Perencanaan Pembangunan Partisipatif .....	67
B. Unsur-Unsur Pemberdayaan Masyarakat .....	85
C. Pemberdayaan sebagai Alternatif Pembangunan Masyarakat.....	91

<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>99</b>
-----------------------------	-----------

# **BAB I**

## **PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMBANGUNAN MASYARAKAT**

### **A. Pengertian Perencanaan**

Pengertian perencanaan memiliki sejumlah arti sesuai dengan sudut pandang setiap ahli dan belum ada deskripsi khusus yang bisa dipakai secara umum. Pengertian atau batasan perencanaan tersebut antara lain sebagai berikut.

Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada setiap jenis usaha manusia (Khairuddin, 1992). Perencanaan merupakan kerangka penyusunan program kerja yang bersifat umum maupun yang spesifik, berdasarkan batasan waktu, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang (Sa'id dan Intan, 2001).

Perencanaan merupakan kebijakan yang dianalisis berdasarkan tindakan yang berpola logika dari ilmu manajemen, kepemimpinan, administrasi, kebijakan publik, teknologi dan komunikasi serta ilmu sibernatik

yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi organisasi (Aristo, 2004). Perencanaan, walaupun memiliki makna masa depan, tetapi bukanlah anggapan yang dibuat tersebut tidak diperhitungkan dengan seksama.

Hipotesis dalam metode desain selalu dilandaskan data-data dan perkiraan yang telah terjangkau, dan juga memperhitungkan sumber daya yang ada dan akan dapat dihimpun. Maka dari itu, perencanaan bekerja sebagai landasan sekaligus tolak ukur untuk memutuskan perencanaan berikutnya. Mosher (1965) menyatakan bahwa, seringkali perencanaan hanya meliputi kegiatan-kegiatan baru, atau alokasi keuangan untuk kegiatan-kegiatan lama, tanpa menilai kembali kualitasnya secara kritis.

Acapkali lebih banyak sumbangan dapat diberikan kepada pembangunan dengan memperbaiki kualitas kegiatan yang sedang dalam pelaksanaan daripada memulai yang baru. Perencanaan intinya adalah penentuan pilihan atau cadangan, yaitu menetapkan bagian-bagian dan tahap-tahap perencanaan yang akan ditindaki dari berbagai probabilitas bagian dan tahap yang ada.

Bidang dan langkah yang ditindaki tersebut pastinya dinilai berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, sumber daya yang ada dan mempunyai resiko yang sekecil-kecilnya. Dengan demikian, dalam penetapannya muncul beragam bentuk desain yang merupakan alternatif-alternatif dilihat dari berbagai aspek, seperti yang dijelaskan oleh Westra (Khairuddin, 1992), antara lain: Dari segi jangka waktu, perencanaan dapat dibedakan : (a) perencanaan jangka pendek (1 tahun), dan (b) perencanaan jangka panjang (lebih dari 1 tahun).

Dari segi luas lingkungannya, perencanaan dapat dibedakan sebagai berikut: (a) perencanaan nasional (umumnya untuk mengejar keterbelakangan suatu bangsa dalam berbagai bidang), (b) perencanaan regional (untuk menggali potensi suatu wilayah dan mengembangkan kehidupan masyarakat wilayah itu), dan (c) perencanaan lokal, misalnya; perencanaan kota (untuk mengatur pertumbuhan kota, menertibkan penggunaan tempat dan memperindah corak kota) dan perencanaan desa (untuk menggali potensi suatu desa serta mengembangkan masyarakat desa tersebut).

Dari segi bidang kerja yang dicakup, dapat dikemukakan antara lain seperti: industrialisasi, agraria (pertanahan), pendidikan, kesehatan, pertanian, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya. Dari segi tata jenjang organisasi dan tingkat kedudukan menejer, perencanaan dapat dibedakan sebagai berikut: (a) perencanaan haluan (*policy planning*), (b) perencanaan program (*program planning*) dan (c) perencanaan langkah (*operational planning*).

## **B. Pengertian Partisipatif**

Sebutan partisipasi saat ini menjadi kata kunci dalam setiap program pemberdayaan masyarakat dimana-mana, seakan-akan menjadi merek baru yang wajib terpatri pada setiap hasil kebijakan dan proposal proyek. Dalam pemberdayaannya seringkali disebutkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang diaplikasikan, sehingga cenderung tidak memiliki arti.

Partisipasi sejajar dengan arti peranserta, ikutserta, keterlibatan, atau proses belajar bersama saling mengerti, menganalisis, merencanakan dan melaksanakan tindakan oleh beberapa anggota masyarakat. Asngari (2001) menyatakan bahwa, penggalangan partisipasi itu dilandasi

adanya pengertian bersama dan adanya pengertian tersebut adalah karena diantara orang-orang itu saling berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya.

Dalam menggalang peran serta semua pihak itu diperlukan: sebagai berikut: (1) terwujudnya nuansa yang bebas atau demokratis, dan, (2) terpadunya kebersamaan. Selanjutnya Slamet (2003) menyatakan bahwa, partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Gaventa dan Valderama (Arsito, 2004) mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu sebagai berikut: (1) partisipasi politik (*political participation*), (2) partisipasi sosial (*social participation*) dan (3) partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*), ke tiga hal tersebut dapat dijelaskan bahwa partisipasi politik (*political participation*) lebih berorientasi pada mempengaruhi dan mendudukan wakil-wakil rakyat dalam dewan pemerintahan daripada ikut serta secara aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.

Partisipasi sosial (*social participation*) partisipasi diposisikan sebagai keikutsertaan masyarakat khususnya yang dilihat sebagai *beneficiary* atau kubu di luar proses pembangunan dalam diskusi atau penetapan keputusan dalam semua langkah siklus rencana pembangunan dari pertimbangan kebutuhan sampai penilaian, implementasi, peninjauan dan evaluasi. Partisipasi sosial kenyataannya dilaksanakan agar mempererat proses pembelajaran dan aktivasi sosial.

Hal ini berarti, maksud inti dari proses partisipasi sosial sesungguhnya bukanlah pada kebijakan umum itu sendiri tetapi implikasi komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial. Partisipasi warga (*citizen participation /citizenship*) menitikberatkan pada keikutsertaan langsung warga dalam penetapan keputusan pada dewan dan proses pemerintahan.

Partisipasi warga telah mengubah konsep partisipasi dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau 'kaum tersisih' menuju ke suatu perhatian dengan bermacam pola keikutsertaan warga dalam penyusunan kebijakan dan penetapan keputusan di berbagai medan kunci yang mempengaruhi kehidupan

mereka. Hingga tidak sama dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang lebih mengarah pada rencana penetapan kebijakan umum oleh warga dibandingkan menjadikan gelanggang kebijakan publik sebagai wahana pembelajaran.

### **C. Pengertian Pembangunan**

Menurut Lewwellen, Larrin, dan Kiely (Badruddin, 2009), teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan. Paradigma modernisasi meliputi teori-teori makro mengenai perkembangan ekonomi dan perubahan masyarakat dan teori-teori mikro mengenai mutu-mutu individu yang mendukung proses perubahan. Sedangkan, paradigma ketergantungan merangkum teori-teori keterbelakangan (*under-development*), ketergantungan (*dependent development*), dan sistem dunia (*world system theory*). Arti dari pembangunan bias jadi merupakan hal yang sangat menarik untuk diperdebatkan. Barangkali tidak ada satu bidang ilmu yang paling akurat untuk memaknai kata pembangunan.

Siagian (Badrudin, 2009) menjelaskan bahwa, pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (Badrudin, 2009) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Menurut Alexander dan Portes (Badrudin, 2009), pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti: politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah jalan perubahan yang sengaja diperbaiki dari berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Begitulah prosedur pembangunan terjadi di berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, yang terlaksana pada level makro (nasional) dan mikro (*commuinity/group*).

Makna krusial dari pembangunan adalah terwujudnya kemajuan atau perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi.

#### **D. Pengertian Masyarakat Organisasi**

Org Komunitas dan Perpustakaan Indonesia (2008) menjelaskan bahwa, manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya serta alam lingkungan di sekitarnya. Dengan menggunakan pikiran, naluri, perasaan, keinginan dan sebagainya. Manusia memberi reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Bentuk interaksi masyarakat diwujudkan oleh hubungan yang berkelanjutan dalam suatu kelompok sosial.

Di bawah ini merupakan sejumlah penafsiran masyarakat dari beberapa ahli sosiologi dunia Menurut Selo Sumardjan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

Menurut Karl Marx masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi. Menurut Emile Durkheim masyarakat merupakan suatu

kenyataan objektif pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya. Menurut Paul B. Horton dan C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto alam masyarakat setidaknya memuat unsur atau faktor-faktor sebagai berikut ini: Berangotakan minimal dua orang. Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan. Berinteraksi dalam tempo yang tidak singkat yang menghasilkan individu baru yang saling berhubungan dan menciptakan hukum-hukum interaksi antar anggota sosial. Menjadi bentuk hidup bersama yang menghasilkan peradaban serta keterlibatan satu dan lainnya sebagai anggota masyarakat.

Menurut Marion Levy dibutuhkan empat syarat yang harus dilakukan agar sejumlah individu bisa disebut masyarakat. Ada sistem tindakan utama. Saling setia pada sistem tindakan utama. Mampu bertahan lebih dari masa hidup seorang anggota sejumlah atau seluruh anggota baru diperoleh dari kelahiran atau reproduksi manusia.

## **E. Perencanaan Pembangunan Masyarakat**

Menurut Soetomo (2006), pembangunan masyarakat dilihat dari mekanisme perubahan dalam rangka mencapai tujuannya, kegiatan pembangunan masyarakat ada yang mengutamakan dan memberikan penekanan pada bagaimana prosesnya sampai suatu hasil pembangunan dapat terwujud, dan adapula yang lebih menekankan pada hasil material, dalam pengertian proses dan mekanisme perubahan untuk mencapai suatu hasil material tidak begitu dipersoalkan, yang penting dalam waktu relatif singkat dapat dilihat hasilnya secara fisik.

Pendekatan yang pertama juga disebut sebagai pendekatan yang memprioritaskan jalan dan lebih menekankan pada faktor individunya, sedangkan pendekatan yang kedua dikatakan sebagai pendekatan yang menitikberatkan pada hasil-hasil material dan lebih menekankan pada sasaran. Secara umum pembangunan masyarakat (*community development*) adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara teratur dan bertahap, terencana dan diposisikan untuk memperbesar akses masyarakat agar terwujud kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih indah apabila disandingkan dengan tahap kegiatan

pembangunan setelah itu.

Berlandaskan hal itulah maka pembangunan masyarakat secara umum lingkungan program-programnya bisa dibagi berdasarkan kategori sebagai berikut: (1) *community service*, (2) *community empowering*, dan (3) *community relation* (Rudito dan Budimanta, 2003). Solihin (2006) mengungkapkan tiga tahapan perencanaan pembangunan yaitu sebagai berikut: (1) perumusan dan penentuan tujuan, (2) pengujian atau analisis opsi atau pilihan yang tersedia, dan (3) pemilihan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama.

Dari tahapan-tahapan perencanaan tersebut bisa diartikan perencanaan pembangunan wilayah atau daerah seperti berikut, yakni: suatu usaha yang bertahap dan teratur dari bermacam pelaku (aktor) baik secara umum (publik) atau melalui pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat stakeholder lainnya pada level yang tidak sama untuk mengatasi saling ketergantungan dan keterkaitan dari segi fisik, sosial, ekonomi dan segi lingkungan lainnya.

Selanjutnya Adi (2003) pada perencanaan sosial tidak ada asumsi yang pervasif mengenai tingkat intraktabilitas ataupun konflik kepentingan. Dalam perencanaan sosial klien lebih dilihat sebagai konsumen dari suatu layanan (*service*), dan mereka akan menerima serta memanfaatkan program dan layanan sebagai hasil dari proses perencanaan.

Suzetta (2007) menjelaskan bahwa, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 dan No. 40 Tahun 2006, sistem perencanaan ini diharapkan dapat mengkoordinasikan seluruh upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai pelaku pembangunan sehingga menghasilkan sinergi yang optimal dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka prosedur perubahan sosial (atau pembangunan) tersebut butuh dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, konsisten, dan berkelanjutan, melalui peran pemerintah bersama masyarakat dengan memperhatikan kondisi ekonomi, perubahan-perubahan sosio-politik, perkembangan sosial-budaya yang ada, perkembangan ilmu dan teknologi, dan perkembangan dunia internasional atau globalisasi.



## **BAB II**

### **STRATEGI PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMBANGUNAN MASYARAKAT**

Proses pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah mengamanatkan bagaimana membangun untuk kepentingan masyarakat, sehingga akan tercipta keadilan dan kesejahteraan sebagai upaya pemerintah mendapatkan legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat. Legitimasi pemerintah akan membawa kemajuan bagi masyarakat dalam segi pemanfaatan hasil pembangunan untuk kehidupannya sesuai dengan perkembangan jaman.

Untuk mendapatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat ada 2 (dua) hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut: (1) mampu menyerap aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, dan sangat peduli pada kebutuhan masyarakat, (2) mampu melibatkan kemampuan dan motivasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sesuai ketersediaan sumberdaya lokal. Hal ini diartikan bahwa pemerintah perlu memposisikan rakyat sebagai pelaku pembangunan, bukan sekedar sebagai objek pembangunan.

Pembangunan masyarakat akan berhasil, jika peran masyarakat dan pemerintah sangat jelas sebagai subyek dan obyek dari pembangunan. Pembangunan pada teknologi menjelaskan peran pemerintah semakin berkurang dengan hadirnya teknologi yang dapat diakses secara cepat dan tepat oleh masyarakat tentang hasil-hasil pembangunan, sehingga hal ini menjadi model yang perlu dikembangkan oleh pemerintah dalam mereduksi kepentingannya dalam pembangunan masyarakat.

Pelibatan masyarakat dalam pembangunan nasional akan menghasilkan masyarakat yang mandiri dan teruji kapasitasnya sebagai pengguna dan perencana pembangunan. Pada proses pembangunan nasional sesuai teknologi 4.0 dengan hadirnya pemerintah dan masyarakat dalam berkerjasama akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal, karena perencanaan dan pengendalian serta evaluasi akan berjalan seiring sesuai dengan tahapan pembangunan.

Pembangunan masyarakat yang tidak memposisikan masyarakat sebagai subyek hanya akan melahirkan produk-produk pembangunan baru yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat sehingga akan kurang berarti bagi

masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, tanpa adanya peran dan pengendalian serta evaluasi yang optimal dari pemerintah, pembangunan tidak akan berjalan secara teratur dan tidak terarah, yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sangat membutuhkan metode dan strategi yang baik agar hasil pembangunan akan lebih efektif dan efisien. Penyusunan dan penggunaan metode serta strategi pembangunan akan menentukan peran dari masing-masing stakeholder apakah peran masyarakat maupun peran pemerintah dalam merencanakan dan mengimplementasikan hasil pembangunan, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.

Amanat Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang perencanaan pembangunan nasional dan pelaksanaannya harus berorientasi secara bottom up melalui pelibatan masyarakat secara luas. Pemberian wewenang kepada masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah seyogyanya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Melalui pelibatan masyarakat, maka pemerintah akan mampu menyerap aspirasi masyarakat secara holistik sesuai dengan perencanaan yang sudah dilaksanakan. Metode pembangunan nasional melalui pemberdayaan masyarakat adalah menjadikan masyarakat sebagai subyek dalam pelaksanaan pembangunan, karena hal ini sesuai dengan kemajuan teknologi yang menghendaki adanya partisipasi masyarakat melalui penggunaan media sosial secara arif dan bijaksana untuk membantu pemerintah dalam menggerakkan pembangunan nasional. Metode perencanaan partisipatif dalam pembangunan masyarakat dipengaruhi oleh potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan, potensi tersebut antara lain; karakteristik, motivasi, kompetensi dan kemandirian masyarakat.

Potensi individu masyarakat ini berperan penting dalam menentukan arah dan strategi pembangunan, sehingga pemerintah akan menilai sejauhmana hasil implementasi pembangunan sesuai dengan kinerja masyarakat dalam perencanaan secara partisipatif.

### **BAB III**

## **PRINSIP PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMBANGUNAN MASYARAKAT**

Pembangunan melalui keikutsertaan masyarakat melambangkan salah satu usaha untuk mengembangkan potensi masyarakat dalam mempersiapkan pembangunan yang berhubungan dengan kapasitas sumber daya lokal berlandaskan amatan musyawarah, yakni kemajuan harapan berupa keinginan dan kebutuhan riil yang ada dalam masyarakat, kemajuan dukungan dan peran-serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, dan kemajuan rasa-memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun.

Prinsip kerja dari pembangunan melalui partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut: (1) kegiatan kerja diinfokan secara transparan kepada masyarakat dengan melakukan interaksi partisipatif hingga memperoleh dukungan masyarakat, (2) kegiatan kerja dilakukan lewat kerjasama dan kerja bersama kelompok antara masyarakat, pejabat desa dan seantero warga dalam rangka mempersempit kendala dalam kegiatan, (3) kegiatan kerja tidak condong pada kubu tertentu di masyarakat atau

kelompok hingga tidak memancing perpecahan, (4) selama kegiatan berlangsung, sinkronisasi selalu dilaksanakan secara vertikal maupun horizontal, (5) jangan bersikap superior atau merasa paling tahu dalam setiap kesempatan pelaksanaan program kerja, dan (6) jangan memberikan janji kepada siapapun namun keseriusan kerja dalam konteks program kerja yang sudah ditentukan.

*Community Development* sebaiknya menghindari metode kerja *doing for the community* dengan segala kegiatannya dalam pembangunan, namun mengadaptasi metode kerja *doing with the community*. Metode kerja *doing for*, akan merubah masyarakat menjadi pasif, kurang produktif, tidak kreatif dan tidak berdaya, bahkan mengajarkan masyarakat untuk selalu terikat pada bantuan pemerintah atau organisasi-organisasi sukarela pemberi bantuan.

Cara kerja *doing with*, sangat selaras dengan ide besar KI Hajar Dewantara tentang kepemimpinan pendidikan di Indonesia, *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani* yang berfokus akan perlunya kemandirian yang partisipatif di dalam proses pembangunan (Tampubolon, 2006).

**BAB IV**  
**MAZHAB DAN PARADIGMA**  
**PERENCANAAN PARTISIPATIF**  
**PEMBANGUNAN MASYARAKAT**

**A. Jenis Mazhab Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat**

**1. Mazhab Modernisme dan Post-Modernisme Pembangunan Masyarakat**

Secara historis, kebangkitan mazhab modernisme terlihat setelah era pasca perang dunia kedua, dimana ditandai dengan kemajuan teknologi dan industri, sementara kehidupan sosial, ekonomi, dan krisis cultural abad ke-17 sangat mengecewakan sebagai akibat kebijakan pembangunan modernisasi. Dugaan tersebut, sebagai pengejawantahan dari keyakinan pada objektivitas modernisasi yang banyak mendominasi pada era pasca perang adalah objek yang ditinjau secara tajam, tinjauan dalam tersebut terkait dengan kebuntuan dan krisis pada studi pembangunan yang muncul sejak akhir abad ke-17.

Menurut Booth (Sellama, 1999), dari tiga perspektif. Pertama, adalah post-marxist, atau neo-Weberian, penemuan kembali pola-pola dominasi spesifik sosial, budaya dan perbedaan jenis kelamin mereka. Kedua, kuatnya pengaruh perspektif orang-orang

konstruktivisme, menggambarkan tradisi penomenologi sosial dan ahli interaksional antropologi.

Ketiga, sejumlah pertanyaan diantara dua dari yang pertama adalah orientasi aktor (*actor oriented*) pada tipe sosiologi yang mana berusaha untuk menjembatani kerenggangan antara interaksionis (*interactioneism*) dan strukturalis (*structuralism*) dan memberikan solusi teoritikal pada aktor lama versus dilema struktur. Sejauh ini, post-modernisme dihubungkan dengan kritik modernisasi sebagai sebuah teori (jika tidak, modernitas itu sendiri sebagai konsep) dan melalui itu dengan isu-isu bahasa dan kekuasaan, orientasi aktor sosiologi adalah sangat tertutup untuk teori post-moderen, sekalipun pada tipe Rosenau (Sellama, 1999) menyebutnya bahwa, pernyataan itu sebuah jarak yang relatif tetap optimis dan pergiliran kearah kemajuan.

Seperti post-modernisme, orientasi aktor sosiologi berusaha menghalau isu bahasa, pembangunan menyuguhkan sebuah risalah dan menggunakan teknik dekonstruksi untuk mengkritisi litaratur, untuk menghilangkan kekuatan model analisis Foucauldian. Pembangunan pada awalnya adalah penyebaran peradaban Barat, pengertian ilmiah dunia, terbatas pada

budaya Barat dan nilai-nilainya berusaha untuk disebarluaskan.

Menurut Escobar (Sellama, 1999), diskursus sirkulasi dan produksi adalah komponen yang terintegrasi pada latihan kekuasaan dan pembangunan itu sendiri adalah sebuah risalah mempunyai peranan yang mengagumkan, yang demikian itu menurut Escobar, melalui proses ganda pada profesionalisme dan pelembagaan. Pertama, kreasi teknik-teknik dan disiplin mempraktekkan sebagai suatu mekanisme untuk kreasi dan pemeliharaan ekonomi yang benar dan nilai-nilai produksi, sebagai akibat dimana aksi tersebut merupakan alat untuk mengontrol dunia ketiga.

Kedua, kelembagaan, melalui bantuan perwakilan, universitas, organisasi internasional, perwakilan sukarela dan lain sebagainya bertindak sebagai jaringan yang mengorganisir visibilitas dan membuat kekuatan pelatihan menjadi mungkin terjadi. Menurut Chambers (Sellama, 1999), fokus utama dari tinjauan terhadap ilmu pengetahuan positivism dalam pembangunan adalah tidak diragukannya wilayah ekonomi neo-klasik (*neo-classical*).

Secara profesional, fokus ini dibenarkan oleh adanya pengaruh dimana para ahli ekonomi yang memiliki kemampuan atas pembuatan kebijakan, bila dibandingkan dengan ilmu pengetahuan sosial lainnya Berbeda dengan Chambers (Pieters, 1998) mengemukakan dasar pembangunan tidak seperti biasanya dan mungkin ada perdebatan bahwa kunci pertanyaan antara apakah pertumbuhan dan produksi dipertimbangkan sebagai di dalam atau di luar pendekatan pembangunan dari *people-centered* dan apakah ini sejalan dengan program penyesuaian *structural* yang diikuti dengan institusi keuangan internasional (post-development) dapat diartikan sebagai reaksi neo-tradisional terhadap modernitas. Pada tahun 1970, ketidakpuasan terhadap pembangunan dasar bertumpu pada satu alternatif, yakni *people-centered*.

Menurut laporan Dag Hammarskjold Foundation (Pieters, 1998), pembangunan harus dipersiapkan menuju kepuasan dari kebutuhan, beragam dan mandiri dan berkesinambungan dengan lingkungan. Selama bertahun-tahun telah ada penguatan yang berkaitan dengan segala macam bentuk kritik dari *developmentalisme* dasar, seperti anti kapitalisme, lingkungan, feminisme, eko-feminisme,

demokratisasi, pergerakan sosial baru, ekonomi budha, kritik kultural dan analisis post-struktualis dari tujuan lain pembangunan.

Pemikiran di atas sebagai pembangunan alternatif. Alternatif secara umum mengarah kepada tiga bentuk yaitu: agen, metoda, dan objektif atau nilai dari pembangunan. Sering kali itu menjadi kunci utama pembangunan alternatif adalah pembangunan dari bawah. Mengacu pada komunitas maupun LSM. Dalam hal lain pembangunan alternatif mengacu pada pembangunan komunitas. Pembangunan alternative sering diidentifikasi dengan pembangunan melalui LSM, rumus pembangunan alternative adalah bahwa peran LSM sudah tentu tidak mencukupi.

Untuk melihat lebih jauh mengenai perbedaan dan persamaan mazhab modernisme dan post-modernisme dapat dilihat pada asumsi modernisme dan perbandingan dengan post-modernisme (lihat lampiran 1). Dilihat dari sudut pandang perbedaan dan persamaan modernisme dengan post-modernisme (tersirat), maka sesungguhnya perkembangan sebuah mazhab pembangunan sangat ditentukan oleh perkembangan lingkungan global dari akibat implementasi dari mazhab pembangunan itu.

Bahwa kelahiran post-modernisme adalah akibat ketidakpuasan terhadap hasil-hasil pembangunan yang menggunakan pendekatan mazhab modernisme. Kalau demikian maka wilayah yang relevan terhadap sebuah mazhab pembangunan tergantung pada perkembangan peradaban kebudayaan masyarakat itu sendiri. Perkembangan peradaban budaya masyarakat yang semakin mengarah kepada masyarakat terbuka dan demokrasi, maka mazhab pembangunan yang relevan adalah mazhab pembangunan yang berorientasi terhadap pembangunan yang pandangannya dititik beratkan pada pembebasan dan penghargaan harkat dan martabat manusia dan lokalitas.

Sebagai upaya memahami lebih jauh mengenai mazhab pembangunan modernisme dan psot modernisme disini dikemukakan dua pandangan, Robert Chambers (Pieterse, 1998) mengungkapkan bahwa, pembangunan yang diartikan sebagai perubahan adalah perubahan yang baik menurutnya adalah transformasi institusional dengan menambahkan sejumlah kebutuhan yang kongrit tetapi masih dalam konteks kebutuhan.

Sedangkan Korten (Pieterse, 1998) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ke arah keadilan, inklusifitas dan keberlanjutan. Lebih jauh kita dapat melihat beberapa faktor pembeda antara modernisme dengan post-modernisme (transformasi sosial) (lihat lampiran 2).

## **2. Tinjauan Historis Gagasan Post-Modernisme**

Sebagai upaya kita memahami perkembangan logis dari munculnya gagasan post-modernisme yang merupakan mazhab alternatif dalam pembangunan, tidak lain adalah dengan jalan mereviu mazhab atau paradigma pembangunan sebelumnya. Upaya tersebut dapat dicapai dengan jalan; memahami dan memaknai mazhab atau paradigma pembangunan modernisme (biasa dipertentangkan dengan post-modernisme) serta transformasi sosial (*social transformation*).

Mazhab/paradigma pembangunan modernism pada awalnya lahir untuk menjawab teori pembagian kerja secara internasional yang menyatakan bahwa setiap negara harus melakukan spesialisasi produksi sesuai dengan keuntungan komparatif yang dimilikinya, yang mengakibatkan terjadinya spesialisasi produksi pada setiap negara sesuai dengan keuntungan komparatif yang

dimilikinya. Dimana ada dua kelompok Negara yaitu sebagai berikut: (1) negara yang memproduksi hasil pertanian, dan (2) negara yang memproduksi barang industri.

Antara kedua pihak negara ini muncul ikatan dagang dan keduanya menurut teori pembagian kerja saling diuntungkan. Tetapi dalam kurung waktu beberapa puluh tahun kemudian, tampak negara-negara industri (kemudian disebut negara maju center. menjadi semakin kaya, sedangkan negara-negara yang memproduksi hasil pertanian (kemudian disebut negara sedang berkembang *phery-phery* semakin tertinggal).

Hal itu dapat di cek melalui neraca perdagangan kedua kelompok negara tersebut. Dimana negara yang mengkhususkan dirinya pada produksi barang industri selalu lebih menguntungkan dibandingkan negara yang memproduksi hasil pertanian (Arief Budiman, 2000).

Karena itu, muncul pertanyaan apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Mengapa terjadi ada negara yang miskin (*the have-nots*) yang biasanya merupakan negara yang memproduksi hasil pertanian dan negara kaya (*the haves to*) yang biasanya negara *industry* ?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut muncul dua

kelompok teori. Pertama, teori yang menjelaskan bahwa kemiskinan ini terutama disebabkan oleh faktor-faktor internal atau faktor-faktor yang terdapat dalam negeri negara yang bersangkutan.

Teori ini dikenal dengan teori modernisasi. Kedua, teori-teori yang lebih banyak mempermasalahkan aspek-aspek luar sebagai pelopor timbulnya kemiskinan di negara-negara tertentu. Kemiskinan ditinjau khususnya sebagai dampak dari terlibatnya kekuatan-kekuatan luar yang menghasilkan negara yang bersangkutan gagal melaksanakan pembangunannya.

Teori-teori ini masuk ke dalam kelompok teori struktural. Kemunculan mazhab post-modernisme sebagai akibat dari adanya proses pembangunan dengan mazhab/paradigma yang tidak memenuhi asas kesejahteraan dan keadilan bagi pemanfaat dan penanggung resiko pembangunan.

Walaupun demikian, tetap terjadi transformasi sosial, yang secara umum menunjukkan suatu gagasan yang melandasi transformasi masyarakat dan budaya dalam menanggapi aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi, perang, atau pergolakan politik. Oleh karena itu, Polanyi (Castels (2001), menyatakan bahwa studi-studi

transformasi sosial perlu dikonsepsi bertentangan dengan faham pembangunan (atau studi pembangunan).

Menurut Castels (2001) kritik terhadap teori pembangunan adalah konteks untuk kemunculan studi transformasi sosial, dalam konteks globalisasi, regionalisasi, dan kemunculan berbagai bentuk penguasaan supranasional. Pada kedua paradigma tersebut di atas, Sellama (1999) mengemukakan bahwa, post-modernisme dapat dipahami sebagai tinjauan dari modernisasi atau sebagai upaya menjadikannya lebih penting.

Secara historis, berbagai kemajuan teknologi dan industri pada era pasca perang yang menandai kebangkitan modernitas sementara sosial, ekonomi dan krisis kultural abad 17 menjadi mengecewakan dengan adanya kebijakan-kebijakan modernisasi. Selain itu, transformasi sosial sebagai bentuk perubahan sosial terencana (walaupun Castles menuliskan konsepnya lebih kepada konsekuensi perubahan global, tetapi disisi lain dikatakan bahwa tujuan pembangunan secara prinsip tidak lagi dapat didefinisikan dalam hal pertumbuhan ekonomi dan modernisasi pada model barat) yang diakibatkan oleh mazhab/paradigma modernisasi memberi jalan terkoreksinya

mazhab/paradigma modernisasi tersebut.

Kedua penjelasan di atas menjelaskan bahwa, sejarah pemikiran post-modernisme secara teoritis menjawab tantangan mazhab/paradigma modernitas yang tidak lagi dapat mencapai tujuannya sendiri, yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial dalam wujudnya sebagai pembangunan atau oleh Dharmawan (2006), disebut sebagai ketidakpuasaan atas kinerja konsep tersebut dalam memfasilitasi proses transformasi di negara-negara sedang berkembang.

### **3. Kritik Mazhab/Paradigma Developmentalisme-Modernisme**

Pembangunan dapat dikatakan sebagai usaha percepatan perubahan secara terencana dari yang tidak ada menjadi ada atau dari yang ada menjadi lebih baik untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Perubahan tersebut, sering kali dimaknai sebagai perubahan material/fisik semata yang cenderung mengabaikan tujuan hakikinya yaitu; kesejahteraan dan keadilan yang dirasakan masyarakat dan warganya yang bermartabat. Artinya pembangunan adalah untuk merekonstruksi dan mentransformasi sosial-kultural masyarakat dan warganya.

Berarti rekonstruksi dan transformasi yang dilakukan adalah merupakan pandangan dan pikiran-pikiran orang luar terhadap sebuah entitas sosial dengan dalih untuk kemajuan (kemajuan untuk siapa?). Beberapa kalangan memandang bahwa pembangunan yang demikian, pada awalnya adalah pembangunan untuk mengejar pertumbuhan atau dengan kata lain pembangunan ekonomi yang pada akhirnya banyak menuai kritik, karena hasil dari pembangunan tersebut tidak banyak dinikmati oleh sebagian besar masyarakat atau warganya.

Walaupun secara kuantitatif ukuran-ukuran yang digunakan dalam pembangunan terus mengalami peningkatan dan pergeseran akibat kesadaran akan kekurangan beberapa mazhab atau teori pembangunan yang dianut dalam sebuah negara. Ukuran-ukuran pembangunan yang biasanya digunakan untuk mengukur kemajuan adalah;

Pertama, Kekayaan rata-rata yang mula-mula digunakan dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dikatakan berhasil melaksanakan pembangunan apabila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi.

Kedua, Pemerataan, menyangkut masalah share hasil-hasil pembangunan yang biasanya diukur dengan Produk Nasional Bruto per Kapita atau Produk Domestik Bruto per kapita. Ukuran lain yang dapat digunakan adalah Gini Ratio yang nilainya diukur dan bergerak antara 0 sampai 1, semakin mendekati nilai 0 semakin tidak timpang, sebaliknya juga demikian.

Ketiga, Kualitas kehidupan yang diukur oleh Moris dalam Arief Budiman (2000), dengan tiga indikator, yaitu sebagai berikut: (1) rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun, (2) rata-rata jumlah kematian bayi, dan (3) rata-rata persentase buta huruf dan melek huruf. Ketiga, angka tersebut jika dijumlahkan akan menghasilkan angka *Physical Quality of Life Index* (PQLI) yang besar nilainya bergerak dari 0 – 100. Ternyata dalam perbandingan angka PNB dengan prestasi PQLI untuk beberapa negara berkembang tidak berkesesuaian antara prestasi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kualitas kehidupan.

Keempat, kerusakan lingkungan terjadi akibat laju pertumbuhan produktivitas yang dicapai akibat pembangunan mengabaikan kelestarian lingkungannya, akibatnya pembangunan tidak sustainable.

Kelima, Keadilan sosial dan kesinambungan. Ukuran kelima semakin menambah kompleksnya pembangunan yang tidak hanya menuntut produktivitas tetapi juga keadilan sosial (pemerataan) dan bahkan faktor lingkungan, yang berfungsi untuk melestarikan pembangunan. Ukuran-ukuran pembangunan tersebut di atas, pada awalnya menekankan pada produktivitas (pertumbuhan ekonomi), walaupun pada akhirnya terjadi proses penyadaran akan pentingnya lingkungan sosial (manusia) dan lingkungan alam (sumber daya lestari).

Munculnya kesadaran tersebut adalah kritik terhadap mazhab pembangunan modernisme yang lebih menekankan pada pertumbuhan dan mengabaikan keadilan dan kelestarian lingkungan. Hal tersebut dapat ditelaah dari apa yang dituliskan Dharmawan (2006), bahwa konsep pembangunan (*development*) menjadi salah satu pendekatan perubahan sosial terencana yang paling luas dan terpenting digunakan oleh banyak pihak. Pembangunan tidak saja berkonotasi damai namun juga terkandung gagasan perubahan nasib terhadap suatu keadaan.

Hal ini khususnya berhubungan dengan upaya terus-menerus yang dilaksanakan untuk melepaskan masyarakat dari belenggu kemunduran sosio-kultural, sebagaimana yang dilabelkan oleh negara maju/barat sebagai tradisionalisme. Dengan konstruksi-pemaknaan seperti itu, maka pembangunan dipahami sebagai proses (dinamik) transformasi sosioekonomi-kultural yang secara sengaja dan terencana dijalankan untuk mengubah status-kemajuan pada sebuah entitas sosial (pedesaan).

Perubahan dibutuhkan masyarakat agar bias lepas dari satu status/tataran (ketertinggalan) ke status/tataran peningkatan berikutnya yang dianggap lebih mapan dan modern. Oleh karena tingkatan perkembangan suatu masyarakat menggunakan standar atau ukuran-ukuran kualitatif dan kuantitatif seperti yang diketahui di negara-negara maju (Eropa Barat dan Amerika Utara), maka sebagai sebuah *socio-cultural change* tahap pembangunan acap kali disamakan artinya dengan tahap modernisasi *ala Westernisasi*.

Modernisasi ala westernisasi (*western development mentalism*) adalah tahap pembangunan yang menggunakan bentuk atau pola serta standar normatif dan orientasi nilai budaya Barat sebagai tolak ukur kemajuan tunggal Peet

dan Hartwick (Dharmawan, 2006). Berbeda dengan western developmentalism, White (2004) yang menulis *Is 'Empowrment' the Answer?* mengkritik developmentalisme-modernisme dengan menelaahnya dari sudut pemberdayaan dengan penekananan dari sudut komunikasi pembangunan.

White mengungkapkan bahwa teori-teori terbaru dari komunikasi pembangunan mempertimbangkan kekurangan politik, ekonomi dan budaya kekuasaan pada bagian-bagian yang statusnya rendah sebagai pusat masalah yang dialamatkan ke pembangunan. Mayoritas mereka tidak mempunyai akses terhadap pendidikan, bimbingan teknis, kesehatan yang baik, dan kebutuhan perumahan untuk memberi kontribusi kepada pembangunan nasional. Sebuah isu yang lebih dalam adalah nilai-nilai budaya yang mana melihat minoritas seperti perempuan tidak mempunyai kemampuan memberikan kontribusinya.

Pergerakan-pergerakan baru (*new movements*) melihat untuk memberdayakan (*to empower*) mereka adalah menandai kembali arti dari jender, pemuda, ras, kesukuan dan wilayah/daerah adalah aktor-aktor kunci dalam proses pembangunan dan untuk itu sama pentingnya

dengan mengakses sumber daya. Pemberdayaan (*empowerment*) adalah proses central pada pembangunan, tetapi pemberdayaan, argumentasi tersebut perlu diletakkan dengan kerangka kerja yang lebih luas, dengan melihat tujuan pembangunan sebagai penerimaan budaya dan politik serta hak-hak azasi manusia secara universal.

Kekuasaan (*power*) harus dilihat sebagai sebuah sumber pertanggungjawaban sosial dan pelayanan. Pergerakan pemberdayaan tidak dapat berhenti setelah mereka mendapatkan apa yang layak mereka dapatkan, tetapi harus respek terhadap pencapaian semua hak-hak di dalam masyarakat (*society*).

Develop mentalisme modernisme menekankan pada ukuran-ukuran kuantitatif dalam pencapaian tujuan melalui pembangunan dengan standar normatif dan orientasi nilai budaya barat sebagai paramaternya, sehingga ia melupakan masalah distribusi hasil-hasil pembangunan berupa keadilan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Karena itu mazhab/paradigma developmentalisme-modernisme tidak mampu mengembangkan transformasi sosial ekonomi yang dapat mendorong kemajuan ketataran yang lebih tinggi.

Pendekatan pembangunan model pemberdayaan lebih kepada respon terhadap mazhab pembangunan modernisme yang banyak menyisakan persoalan sosial ekonomi di masyarakat, bahkan modernisme menggandeng kepentingan kapitalisme global yang mendistorsi kehidupan sosial ekonomi dan politik lokal, sehingga perlu dibuat suatu model pembangunan dari dalam komunitas yang dapat membangun keberdayaan masyarakat.

Keyakinan tersebut diungkapkan oleh Brox (Dharmawan, 2006) dengan *thesis the crisis of community* yang ditandai dengan problematika ketertinggalan, ketidakberdayaan, kemiskinan, serta kehilangan identitas. Jadi Kinerja developmentalisme-modernisme yang dianggap tidak mampu melakukan transformasi sosial tersebut, mendorong untuk ditemukannya model pembangunan yang diharapkan mampu melakukan transformasi sosial dipedesaan yang tentunya berbasis lokal dengan karakter lokalitasnya.

#### **4. Persyaratan Post-Modernisme sebagai Pendekatan Transformasi Masyarakat**

Modernisme menawarkan perubahan tradisional ke modern yang ditandai dengan penilaian uang kemelimpahan harta benda dan ukuran ekonomi yaitu pertumbuhan dan pada dataran yang lebih luas negara adalah industrialisasi. Modernisme yang menganut paham pertumbuhan, akumulasi modal dan dalam taraf implementasi bersifat top down dan difusi inovasi, tujuan dan implementasi mazhab ini tidak mencerminkan atau mengabaikan masalah pemerataan, keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, yang penting pada tataran makro terjadi pertumbuhan yang dapat menunjukkan kemajuan suatu bangsa, misalnya tingginya laju pertumbuhan ekonomi, rendahnya tingkat inflasi, besarnya cadangan devisa, meningkatnya ekspor dan mengutanya nilai tukar mata uang yang dapat dilihat dari angka-angka statistik.

Tetapi penilaian kualitatif akan kehidupan masyarakat secara keseluruhan tidak menjadi fokus perhatian mazhab modernisme, misalnya pertumbuhan di share dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, apakah hasil pembangunan mendorong kepeningkatan

harkat dan martabat manusia, apakah kehidupan sosial budaya masyarakat mendapat tempat dalam pembangunan, apakah pengetahuan lokal masih dihargai dengan adanya liberalisasi pembangunan yang dianut mazhab modernisme. Tentu saja, sebagian atau seluruhnya belum terakomodir dengan mazhab modernisme. Karena ketidakpuasan terhadap modernisme, maka muncul pola pembangunan yang ditawarkan sebagai anti tesis, yaitu post-modernisme yang menitik beratkan perhatiannya pada posisi ekonomi lokal, memperhatikan eksistensi sistem sosial budaya masyarakat lokal, mendorong integrasi sosial masyarakat.

Post-modernisme sendiri mendorong perubahan yang ditandai perubahan institusi dan rana politik atau dengan kata lain melalui kekuasaan yang menempatkan penghargaan kepada komunitas lokal yang dicirikan dengan sistem perencanaan pembangunan yang bersifat *bottom up*, keagungan negara direduksi dengan keagungan lokal, keadilan, pembangunan berkelanjutan, partisipasi dan pemberdayaan. Disamping itu dikembangkan kerjasama berupa kemitraan dan kesamaan politik.

Oleh karena itu, untuk mengadaptasi pola pembangunan post-modernisme, maka harus dilakukan rekonstruksi terlebih dahulu sebagai prasyarat untuk bisa dijadikan landasan mencapai tujuan pembangunan ala post-modernisme. Dekonstruksi harus dimulai dari beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

Pertama, aktor yang menekankan pada kemampuan mengartikulasi paham teoritis dan paham praksis dari post-modernisme sebagai sebuah diskursus pembangunan, oleh Rosenau (Sellama, 1999) disebutnya sebagai pengkritisan literatur, karena ilmu pengetahuan adalah pusat dari target dekonstruksi yang dijalani oleh pembangunan. Disamping itu, menurut sejarahnya pembangunan dari metoda ilmiah adalah dekat hubungannya dengan ideologi penerangan yang merupakan gabungan tenaga penggerak dan pengesahan, lebih spesifik berkaitan dengan kemajuan pemikiran dan objektivitas. Hal tersebut menyangkut produk mental yang disebut bersifat ilmu pengetahuan ilmiah Kloppenburg (Sellama, 1999).

Dari sudut pandang ini, maka sistem kekuasaan dan kepentingan harus diatur sedemikian baiknya dengan didasarkan pada konsep ilmu pengetahuan yang rasional

dan objektif dengan tidak melupakan akar budaya dan pengetahuan lokalitas. Hal tersebut dimaksudkan, agar aturan main dalam pembangunan tidak menyimpan dari hakikat pembangunan ala post-modernisme.

Kedua, profesionalisme dan institusi, kemampuan mengembangkan profesionalisme dalam segala bidang pembangunan, melalui kreasi dan teknik-teknik latihan yang disiplin dan bertindak sesuai dengan mekanisme kreasi yang berbasis pada kebenaran nilai-nilai lokalitas. Disamping itu institusi yang dikembangkan baik dalam pengertian lembaga ataupun dalam pengertian aturan main yang dapat bertindak sebagai jaringan untuk menyokong tujuan dan implementasi pembangunan ala post-modernisme, sebagaimana ditulis oleh Escobar (Sellama, 1999), kelembagaan melalui bantuan perwakilan, universitas, organisasi internasional, perwakilan sukarela dan lain-lain sebagainya yang bertindak sebagai jaringan yang mengorganisir visibilitas yang membuat kekuatan latihan mungkin terjadi.

Ketiga, ekonomi, politik dan budaya. Ketiga bidang tersebut harus direkonstruksi sedemikian rupa, mungkin kebalikan dari tujuan dan implementasi modernisme. Bidang ekonomi tidak semata menekankan pada

pertumbuhan, tetapi lebih ditekankan pada pemerataan distribusi yang berkeadilan dan pengembangan ekonomi local yang spesifik menurut lokalita masyarakatnya. Bidang politik, keputusan-keputusan politik harus mengakomodir kepentingan tingkat lokal dan memperhatikan peran komunitas dengan dinamikanya masing-masing dalam mengambil bagian pada pembangunan. Bidang budaya, pembangunan harus mampu mengapresiasi budaya lokal setempat dengan jalan member ruang masing-masing komunitas berkembang sesuai dengan budaya lokal yang dimaknai dalam pandangan hidup mereka. Keempat, lingkungan dan orientasi asumsi post-modernisme adalah komunitas, keadilan sosial, solidaritas, keuntungan dan hak individu.

Di atas orientasi asumsi post-modernisme harus sejalan dengan tuntutan peradaban penghargaan terhadap lingkungan sosial, budaya, politik, dan alam. Bahwa pembangunan bertumpu pada ketersediaan sumberdaya alam dan dilakukan pada lingkungan sosial masyarakat dengan lembaga budaya dan politik yang menyertainya, satu sama lainnya harus diselaraskan untuk mendapatkan landasan yang kokoh dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Keempat pokok pikiran di atas, harus dapat direkonstruksi seandainya kita akan memilih post-modernisme sebagai pendekatan transformasi masyarakat. Walaupun pemikiran tersebut bernuansa konseptual pada rana penyusun konsep yang harus direkonstruksi sebagai tujuan untuk menghindari kesalahan arah model post-modernisme, persiapan sosial (social preparation) dan sosialisasi (socialitation) pada masyarakat sebagai arena pembangunan harus secara simultan dibangun bersamaan proses adopsi pembangunan ala post-modernisme.

## **B. Pergeseran Paradigma Pembangunan Masyarakat**

### **1. Paradigma Pembangunan Masyarakat**

Paradigma pembangunan yang diuraikan dalam tulisan ini dimaksudkan untuk memahami terjadinya trend baru dan fakta telah terjadinya benturan peradaban yang sangat dahsyat yang mengharuskan cara pandang setiap pelaku pembangunan terutama para saintis atau ilmuwan dalam memahami pergeseran paradigma ilmu pengetahuan yang dengan sendirinya akan diikuti oleh berkembangnya paradigma pembangunan ke arah cara pandang dan pemahaman yang holistik.

Disisi lain, pembahasan tulisan ini dimulai dengan pengantar yang menunjukkan telah terjadinya pergeseran paradigma ilmu pengetahuan, kemudian diikuti dengan pergeseran paradigma pembangunan. Selanjutnya diuraikan beberapa paradigma pembangunan dan pergeseran paradigma pembangunan sebagai sebuah peta paradigma pembangunan yang akhirnya ditutup dengan pembahasan pembangunan masyarakat sebagai salah satu paradigma pembangunan alternatif untuk menjawab tantangan perubahan zaman yang telah mengidentifikasi dirinya pembangunan masyarakat- sebagai antitesis paradigma pembangunan yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam hal pergeseran paradigma tersebut, jauh sebelumnya telah terjadi perubahan cara pandang yang mendasar terhadap fenomena dalam kehidupan yang tidak lagi memadai untuk dapat dijawab oleh sains yang telah dikembangkan dengan paradigma Newtonian.

Paradigma ilmu pengetahuan mengalami perkembangan dari apa yang disebut sebagai paradigma Newtonian ke paradigma Newsains, yang tentu saja pergeseran tersebut memicu cara pandang teoritis

terhadap logika ilmu pengetahuan yang terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, termasuk pandangan secara teoritis atau konseptual ilmu pengetahuan penyuluhan pada konteks pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut dapat ditelaah dan direduksi dalam konteks teoritis bahwa paradigma Newtonian lebih menitik beratkan pada tiga prinsip utama terhadap proses kehidupan pembangunan, yaitu yang disebut: Reduksioneisme, yang memandang bahwa setiap benda (struktur) selalu terdiri atas bagian-bagian atau partikel dasar yang masing-masing terisolasi dalam ruang dan waktu yang bersifat absolut yang saling berhubungan melalui aksi dan reaksi.

Karena setiap benda selalu terdiri atas bagian-bagian, maka sifat atau karakteristiknya juga selalu dapat diperkirakan dengan menganalisis sifat dari bagian-bagian penyusunnya; *Determinisme*, mengajarkan bahwa alam semesta diatur oleh seperangkat hukum besi. Olehnya, segala sesuatu dapat diramalkan karena mengikuti hukum sebab-akibat yang pasti, doktrin ini percaya bahwa pengetahuan ilmiah mampu mencapai kepastian mutlak dan bersifat final; *Obyektivisme*, adalah metoda pengamatan

yang menarik garis pemisah yang tajam antara pengamat dengan yang diamati.

Ada pengamat obyektif yang hanya memandangi dunianya, menimbang dan mengukurnya serta melakukan percobaan di atasnya, dengan demikian dapat memanipulasi dan mengontrolnya. Dengan kata lain, penjelasan atau deskripsi ilmiah bersifat obyektif, yakni terlepas dari manusia yang mengamati dan dari proses pengamatan. Salah satu pengaruh paling penting dari paradigma ini adalah cara berfikir yang selalu mencoba menyederhanakan semua persoalan, senang-tiasa mencari nilai rata-rata variabel/fenomena alam dan sosial yang teramati, tanpa menyadari bahwa simpangan-simpangan kecil yang diabaikan itu ternyata memiliki potensi untuk mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan *teori chaos* (Mappadjantji Amien, 2001).

Bila prinsip paradigma Newtonian tersebut ditarik kedalam pembangunan masyarakat, maka pembangunan yang ada selama ini, yaitu pembangunan yang melakukan orientasi aktivitasnya adalah mereduksi perkembangan masyarakat kedalam suatu sekat-sekat pembangunan yang hanya memandangi bahwa pembangunan adalah meniru perkembangan negara-negara yang dianggap maju *modern*

secara fisik tanpa mau melihat secara holistik bahwa kesejahteraan umat manusia penduduk jauh lebih penting dari sekedar peningkatan dan perkembangan ukuran-ukuran kemajuan pembangunan (fisik dan atau GNP/PDB-kemajuan ekonomi).

Pandangan Newtonian tersebut bergeser ke pandangan Newsains atau perluasan paradigma ilmu pengetahuan yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut: (i) pergeseran dari reduksionalisme atau bagian (*the part*) ke konsep keseluruhan (*thewhole*), (ii) pergeseran dari *obyektivisme* ke proses epistemologi, dan (iii) pergeseran dari doktrin *deterministik* ke *probabilistik*.

Realitas kuantum mengajarkan bahwa fenomena alam tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik unsur-unsur pembentuknya, tetapi lebih banyak ditentukan oleh interaksi antara unsur-unsur tersebut. Dalam paradigma lama diyakini bahwa pada setiap sistem yang kompleks, dinamika dari keseluruhan dapat dipahami melalui pemahaman terhadap sifat atau karakteristik bagian-bagiannya. Dalam paradigma baru, hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan menjadi terbalik.

Sifat-sifat bagian hanya dapat dimengerti melalui dinamika keseluruhannya. Pemahaman terhadap suatu *entitas* tidak dapat lagi dilakukan dengan memfokuskan pengamatan pada bagian-bagian pembentuknya, tetapi pada jaring-jaring hubungan yang kompleks antara bagian-bagian penyusunnya.

Disini pulalah pentingnya melihat peta paradigma pembangunan secara menyeluruh, sehingga pembangunan (baca pelaku pembangunan) dapat merespon perubahan tersebut dan amat sangat penting diajarkan pertimbangan dan menaati asas paradigma perubahan tersebut. Sifat baru alam semesta, bahwa alam semesta senantiasa menjawab pertanyaan kita sesuai dengan pertanyaan itu sendiri.

Ini membawa implikasi yang luar biasa realitas yang nampak pada kita adalah selalu selaras dengan apa yang kita impikankan atau bayangkan untuk mewujudkannya. Alam semesta ternyata sangat partisipatif. Cara kita bertanya, menentukan jawaban yang akan kita peroleh. Alam semesta adalah gelombang probabilitas. Mewujudkan dirinya sesuai dengan peralatan yang kita gunakan.

Wujud itupun selanjutnya kita interpretasikan sesuai persepsi kita yang dibentuk oleh akumulasi pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki. Implikasi dari perubahan tersebut adalah bahwa alam di samping bersifat sangat partisipatif, juga sekaligus *stingy*. Ia memperlihatkan sisi yang kita inginkan, tetapi saat yang sama menyembunyikan sisi lainnya.

Alam tidak pernah mau memperlihatkan semua realitas pada seorang pengamat dalam waktu yang bersamaan. Dari fenomena elektron di atas kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus sanggup menelan realita yang sepiintas tampak bertolak belakang (*paradox*). Kita harus belajar hidup dalam kemenduaan, karena alam semesta terdiri dari unsur-unsur yang bertentangan tetapi saling melengkapi.

Pergeseran determinisme ke probabilisme, alam semesta adalah gelombang probabilitas, bagi penganut paradigma Newtonian yang percaya bahwa tingkah laku alam semesta senantiasa dapat diramalkan secara pasti, karena tunduk pada hukum-hukum yang bersifat deterministik. Mengacu kepada konsep keseluruhan yang telah dijabarkan sebelumnya yang antara lain menyatakan bahwa sifat atau kinerja suatu bagian ditentukan oleh sifat

keseluruhannya, menyebabkan doktrin determinisme tidak mungkin lagi dipertahankan, karena hubungan yang ada sedemikian kompleks sehingga tidak mungkin dapat dianalisis dengan metoda klasik/deterministik. Tingkah laku suatu obyek ditentukan oleh dua perangkat variabel, yaitu variabel lokal dan variabel non-lokal.

Variabel pertama berada di dalam obyek yang terlibat, disini variabel-variabel tersebut di wakili oleh hubungan antara peristiwa-peristiwa yang terpisah secara ruang melalui sinyal-sinyal partikel dan jaringan partikel yang tunduk pada hukum-hukum pemisahan ruang biasa. Variabel kedua adalah berupa hubungan-hubungan non-lokal yang bersifat seketika dan tidak dapat diramalkan secara matematis.

Hubungan-hubungan non-lokal itu merupakan esensi realitas kuantum. Setiap peristiwa dipengaruhi oleh alam semesta secara keseluruhan, yang meskipun pengaruh tersebut tidak dapat digambarkan secara rinci, tetapi dapat dikenali adanya tatanan yang bisa diungkapkan dalam pengertian hukum-hukum statistik (Capra, 1982 dalam Mappadjantji Amien, 2001).

Bergesernya cara pandang ilmu pengetahuan terhadap realitas dari bagian ke konsep keseluruhan, obyektivisme ke proses epistemologi, dan deterministik *keprobabilistik*. Menginsyarkan pentingnya kita menata ulang cara berpikir dan cara kita memandang pembangunan untuk menjawab tantangan peradaban jika kita masih menghendaki eksis dan tetap menjaga keberlangsungan pembangunan yaitu seperti yang dikemukakan Sugihen (2007), bahwa pembangunan masyarakat adalah pembangunan martabat yang mampu mengangkat harkat dan martabat manusia serta kesejahteraan masyarakat secara luas.

Perubahan yang sangat drastis dalam tata kehidupan dunia yang ditandai oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang satu sama lainnya saling berpengaruh dan ikut mempengaruhi sistem kehidupan secara global dan juga mempengaruhi kehidupan lokal, termasuk paradigma pembangunan secara keseluruhan mengisyaratkan perlunya (sebagai ilmuan) memahami peta perubahan paradigm pembangunan.

## 2. Peta Pergeseran Paradigma Pembangunan

Kata pembangunan telah menjadi bahasa dunia. Hasrat bangsa-bangsa untuk mengejar bahkan memburu masa depan yang lebih baik merupakan konsep yang berkaitan dengan konsep pembangunan. Konsep tersebut antara lain pertumbuhan (*growth*), rekonstruksi (*reconstruction*), modernisasi (*modernization*), westernisasi (*westernization*), perubahan sosial (*sosial change*), pembebasan (*liberation*), pembaharuan (*innovation*), pembangunan bangsa (*nation building*), pembangunan nasional (*national development*), pembangunan (*development*), pengembangan dan pembinaan (Ndraha, 1990).

Pembangunan haruslah ditinjau dari perspektif yang lebih luas yaitu dalam konteks sistem sosial yaitu hubungan interdependen antara faktor-faktor ekonomis dan faktor-faktor non ekonomis' (Todaro, 1999). Selanjutnya diuraikan perspektif pergeseran aliran teori pembangunan ekonomi, yang meliputi pendekatan, yaitu sebagai berikut: (1) dasawarsa 1950-an dan 1960-an pembangunan dititikberatkan dengan pertumbuhan ekonomi agregat secara cepat-pendekatan tahapan *linear*.

Pada dasawarsa ini teori tahap-tahap pertumbuhan oleh Rostow dan model pertumbuhan *Harrod-Domar* sangat mendominasi pembangunan, (2) dasawarsa 1970-an pembangunan dititik beratkan pada teori dan pola perubahan struktural dan revolusi ketergantungan internasional. Dasawarsa ini dimotori oleh Lewis dengan model pembangunan yang meusatkan perhatian pada transformasi struktural dan diubah serta dilanjutkan oleh John Fei dan Gustav Ranis dengan Model Dua-Sektor Lewis. Teori lainnya yang dikembangkan oleh Hollis B. Chenery tentang model perubahan struktural.

Teori lainnya yang berkembang adalah model ketergantungan *neokolonial* yang salah satu penganutnya adalah *Theotonio Dos Santos*, model paradigma palsu, dan tesis pembangunan dualistik, (3) dasawarsa 1980-an pembangunan dengan menggunakan pendekatan kontrarevolusi pasar bebas neoklasik. Dasarwarsa ini pendekatannya adalah pasar bebas yang tokohnya antara lain Lord Peter Bauer, Deepak Lal, Ian Little, Bela balassa, Julian Simon dan lain-lain, pendekatan ramah terhadap pasar dan teori pertumbuhan neoklasik tradisional model pertumbuhan *neoklasik Solow* yang dipelopori oleh Robert Solow, dan (4) dasarwarsa 1980-an dan awal dekade 1990-

an pembangunan memakai pendekatan teori perkembangan ekonomi baru atau endogen (*new or endogenous theory of economic growth*), teorinya adalah teori pertumbuhan *endogen* atau secara sederhana disebut teori pertumbuhan baru.

Pergeseran paradigma pembangunan ekonomi yang dilukiskan Todaro di atas penting untuk dipahami sebagai bagian dalam penelusuran dan membangun pemahaman bersama mengenai peta pergeseran paradigma pembangunan, yang juga merupakan bagian upaya memahami pembangunan masyarakat, maka *reviuvw* terhadap pendekatan pembangunan perlu dilakukan.

Larrain (1994) menjelaskan bahwa sejarah teori-teori utama pembangunan, yang dimulai dari masa *competitive capitalism* (1700-1860) yang pelopori oleh Adam Smith, dan Ricardo dalam teori pembangunan *classical political economy*, kemudian dilanjutkan dengan teori pembangunan *historical materialism* yang dipelopori oleh Marx dan Engels.

Masa *age of imperialism* (1860-1945), dengan pengembangan teori *Neo-classical political economy* yang dipelopori oleh Marshall, Walras, Jevons, kemudian berkembang *teori classical theory of imprealism* yang

dipelopori oleh Hilferding, Bukharin, Luxemburg, dan Lenin. Selanjutnya *era late capitalism* (1945-1980), dimana pada awalnya tahun 1945-1966 masa expansion yang ditandai dengan perkembangan *theory modernization* yang dikembangkan oleh Hozelitz dan Rostow. Teori modernisasi inilah yang dipakai di Indonesia pada pemerintahan orde baru yang dikenal dengan teori tinggal landas.

Selain teori modernisasi, pada kurung waktu tersebut juga berkembang *theory of imperialism refurbished* oleh Baran, pada Negara-negara pinggiran (periphery) kurung waktu tersebut teori yang berkembang digunakan adalah *ECLA's analysis* oleh Prebisch. Fase tahun 1866-1980 adalah *fase declaration and crises*, yang diikuti dengan perkembangan teori pembangunan *neo-liberalism* yang dipelopori oleh Friedman, kemudian *berkembang kea rah world system and unequal exchange theories* oleh Wellerstein dan Emmanuel) dan selanjutnya teori *articulation of modes of production* oleh Rey.

Pada kurung waktu ini, di Negara-negara pinggiran (periphery) berkembang teori pembangunan *dependency theories* oleh Frank dan Cardoso serta teori *unequal exchange theories* yang dipelopori oleh Amin. Jika disimak perkembangan teori tersebut, maka sesungguhnya teori

pembangunan yang terus mengalami perkembangan membuktikan bahwa tidak ada satu teoripun yang mampu menjawab tantangan dan perkembangan tentang apa yang disebut pembangunan.

Walaupun demikian, para ahli yang menggeluti teori-teori pembangunan terus melakukan formulasi dan pengembangan teori untuk menjawab tantangan dan perkembangan tuntutan pembangunan dari zaman ke zaman. Disisi lain pergeseran teori-teori pembangunan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan mulai bergeser dari hanya sekedar memenuhi kebutuhan fisik ke kebutuhan non fisik (pembangunan sosial) lebih cenderung ke fokus pembangunan manusia.

Selanjutnya pergeseran teori tersebut juga menunjukkan akselerasi terhadap perubahan peradaban yang begitu cepat ditandai dengan perubahan paradigma ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan dan globalisasi dengan segala aspeknya. Terakhir, pergeseran teori tersebut telah memperlihatkan kecenderungannya pada fokus masyarakat lokal (pembangunan mencoba memahami dan mengakomodir kearifan-kearifan lokal (*local indigeneous*)).

Pergeseran lainnya dari model pembangunan dapat dilihat dari sudut pendekatannya dimana pendekatan pembangunan yang didominasi oleh pendekatan politik, maka aktornya adalah negara dan birokrasi dengan mekanisme pendekatan pada kekuasaan dan politik, sedangkan idiologinya adalah statisme konservatif. Selanjutnya bergeser kependekatan ekonomi, dimana dititik beratkan pada perkembangan ekonomi yang menjadi tumpuan dari pembangunan; dalam pendekatan demikian yang menjadi aktornya adalah pasar dan pengusaha dengan mekanisme kekuasaan dan ekonomi, sedangkan idiologinya adalah liberal.

Kedua pendekatan pembangunan tersebut masih belum mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan, maka pendekatan yang dikedepankan adalah pendekatan moral, dimana pendekatan ini yang bertindak sebagai aktor adalah komunitas lokal dan/atau rakyat, dengan mekanisme kekuasaan dan rakyat, sedangkan idiologinya adalah populis. Terlihat bahwa dari segi pemetaan konsep pembangunan secara global yang mencakup pembangunan pada negara berkembang dan negara maju (*centre dan periphery*) dan pendekatan pembangunan yang di jelaskan di atas, memperlihatkan

kecenderungan pembangunan yang mengarah kepada pembangunan yang mendorong peran serta masyarakat, dimana masyarakatlah yang menjadi pelaku utama pembangunan, namun kelihatan negara (pemegang otoritas kekuasaan) masih tetap mendapat tempat dalam semua idiologi pembangunan yang terus mengalami perkembangan termasuk pembangunan dengan idiologis populis, walaupun mungkin intensitas kekuasaan negara juga semakin mengalami pergeseran dari campur tangan ke fasilitator. Pergeseran peta teori pembangunan dan pendekatannya, membawa konsekwensi terhadap berbagai istilah dalam pembangunan.

Misalnya, konsep pembangunan masyarakat mulai populer pada era dimana pembangunan mengakui identitas masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan. Oleh karena itu dapat disandingkan maknanya sebagai pengembangan masyarakat *community development*. Baik dimaknai sebagai pengembangan kapasitas maupun kapabilitas dalam sebuah masyarakat.

Tidak hanya mempunyai hak, tetapi juga tanggungjawab untuk memilih dan membuat keputusan mereka sendiri dengan asumsi bahwa mereka akan dilengkapi dengan pengetahuan dan pemahaman yang

dibutuhkan untuk membuat keputusan tersebut. Kedua, perhatian untuk perubahan situasi lokal dengan menunjukkan perbaikan situasi-situasi lokal yang disebut komunitas. Tentu saja, sistem-sistem nilai mempengaruhi penduduk dan asumsi keduanya, nilai-nilai individu dan kelompok dapat mempengaruhi. Mereka akan bermufakat bahwa satu perubahan dapat dihormati sebagai suatu peningkatan. Ketiga, satu kepercayaan bahwa kemajuan kekal itu dapat dicapai hanya melalui pengembangan dalam pengertian local, inisiatif local, dan menolong diri sendiri secara local dengan partisipasi yang mungkin dapat diperluas secara lokal.

Point untuk menunjukkan pentingnya pendidikan, termasuk kedua-duanya pendidikan massa dan pendidikan itu sendiri dan pengembangan pemimpin lokal, professional dan pekerja sukarela, kebutuhan analisis situasi, merencanakan, dan mengimplementasikan perencanaan tersebut. Keempat, satu penekanan pada pengembangan yang seimbang dari semua sumberdaya, fisik dan manusia, dalam masyarakat atau dibawah wilayah pembahasan.

Apakah penekanannya pada keseimbangan pembangunan, seperti perbedaan dari kepentingan pembangunan secara khusus, itu yang mencirikan program-program pengembangan masyarakat dari banyak program-program pembangunan lainnya. Pada ukuran yang sangat dasar organisasi dengan sebuah perhatian untuk pengembangan total masyarakat. Kelima, Satu asumsi dari sumberdaya dari luar, termasuk konsultan dan bimbingan teknis harus tersedia untuk situasi-situasi masyarakat lokal.

Termasuk dalam hal ini adalah asumsi sumberdaya-sumberdaya yang datang dari luar tersebut, harus tersedia dari berbagai sumber, keduanya dari masyarakat dan swasta, dan pekerja profesional pada agen-agen dan organisasi-organisasi yang akan berpengaruh terhadap keabsahan penerimaan pendekatan dan keseresiaan pekerjaan pengembangan masyarakat. Isyarat ini penting pada semua wilayah, Negara dan pendekatan nasional untuk pengembangan masyarakat.

Jika kita melihat ada orang melakukan pendekatan atau situasi ini adalah sebagai penilaian yang akurat pengembangan masyarakat dalam format yang sempurna, hal ini perlu untuk diingat sebagai suatu yang ideal.

Sebuah tujuan kearah kerja keras, namun satu dan lain hal itu tidak pernah dicapai. Jika kita akan menguraikan hal itu dalam beberapa kata, kita mungkin akan mengatakan bahwa ini adalah proses dimana orang-orang berada dalam satu area, hal mana mereka memilih untuk berpikir sebagai masyarakat, pergi menganalisis tentang suatu situasi, menentukan kebutuhannya dan peluang-peluang yang tak dipenuhi, memutuskan apa yang dapat dan harus dilaksanakan untuk memperbaiki situasi dan kemudian pindah ke sebuah prestasi yang disepakati sebagai tujuan dan sasaran yang sedang berlangsung.

Kita tidak melakukan pengembangan masyarakat sampai kita sudah melakukan tindakan pada masyarakat. Tindakan disini adalah tanggungjawab. Pengembangan komunitas merangkum keduanya antara pendidikan dan tindakan dan tujuan dari pendidikan adalah untuk mempersiapkan dan menghadapi tindakan rasional.

Perserikatan bangsa-bangsa dalam definisinya melihat bahwa pengembangan masyarakat adalah sebuah proses, itu sangat tepat dimana oleh Sanders dalam Carry (1976), memperjelas hal tersebut dengan mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai sebuah proses. Dikatakan bahwa dalam melihat pengembangan

masyarakat yang bergerak dari satu tahap kondisi ke kondisi selanjutnya, meliputi sebuah perubahan kemajuan dalam terminologi kriteria yang spesifik.

Selanjutnya digambarkan sebuah proses aksi sosial dalam hal mana penduduk sebagai suatu komunitas mengorganisir diri mereka dalam membuat perencanaan dan aksi, menggambarkan secara umum kebutuhan-kebutuhan dan permasalahan-permasalahan individu, membuat perencanaan individu-individu dalam kelompok untuk melihat kebutuhan dan pemecahan masalah mereka sendiri; melaksanakan sendiri rencana yang dibuat dengan penuh kepercayaan dari sumberdaya mereka sendiri dan melengkapi sumberdaya yang dimiliki dengan layanan dan material-material dari pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah dari luar komunitas bila diperlukan.

Oleh karena itu, pengembangan masyarakat, sesungguhnya adalah pengembangan kapasitas maupun kapabilitas masyarakat lokal untuk membangun diri mereka sendiri ke arah kemandirian sebagai tujuan yang sebenarnya dari pengembangan masyarakat *community development*. Sejarah pembangunan sampai saat ini, memperlihatkan bahwa tidak ada satu paradigma

pembangunan yang dapat berlaku absolut, paradigma tersebut hanya berkesesuaian pada eranya masing-masing.

Benturan peradaban dan perubahan dalam tatanam dunia sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang selanjutnya diikuti perkembangan paradigma pembangunan. Hal tersebut dapat dilihat dari perubahan paradigma ilmu pengetahuan dari Newtonian ke Newsains dan perkembangan paradigma pembangunan akibat perkembangan teori-teori pembangunan itu sendiri. Teori pembangunan dari masa *competitive capitalism* dalam *classical political economy, historical materialism*.

Masa *age of imperialism* dengan rumpung teori *Neo-classical political economy* dan *classical theory of imprealism* Selanjutnya *era late capitalism masa expansion* dengan perkembangan *theory modernization* selanjuthnya berkembang *theory of imperialism refurbished* Negara-negara pinggiran (*periphery*). *fase declaration and crises*, dengan rumpung *neo-liberalism, world system and unequal exchange theories, articulation of modes of production, dependency theories* dan *toeri unequal exchange theories*.

Teori-teori pembangunan memperlihatkan bahwa pembangunan mulai bergeser dari hanya sekedar memenuhi kebutuhan fisik ke kebutuhan non fisik

(pembangunan sosial) dengan kata lain lebih cenderung ke fokus pembangunan manusia yang terus merespon perubahan peradaban serta pergeseran teori ke arah fokus masyarakat lokal (pembangunan mencoba memahami dan mengakomodir kearifan-kearifan lokal (*local indigeneous*)).



## BAB V

### PROSEDUR PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMBANGUNAN MASYARAKAT

#### A. Perencanaan Pembangunan Partisipatif

##### 1. Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Ndraha (1990) menyatakan bahwa, dalam menggerakkan perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, maka perencanaan partisipasi harus dilakukan dengan beberapa usaha sebagai berikut: (1) perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata (*felt need*), (2) dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (*response*), dan (3) dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah laku (*behavior*).

Dalam perencanaan yang partisipatif (*participatory planning*) warga berperan sebagai mitra dalam perencanaan yang ikut bertugas serta secara aktif baik dalam hal pemetaan maupun pelaksanaan rencana, karena walau bagaimanapun warga merupakan stakeholder terbesar dalam pemetaan sebuah produk rencana. Menurut Suzetta (2007), sebagai cerminan lebih lanjut dari

demokratisasi dan partisipasi sebagai bagian dari good governance maka proses perencanaan pembangunan juga melalui proses partisipatif.

Gagasan perencanaan partisipatif didasari dari kesadaran bahwa hasil kerja sebuah inisiatif pembangunan masyarakat sangat ditetapkan oleh semua kelompok yang terhubung dengan ide tersebut. Sejak dirintisnya model perencanaan partisipatif, kata Stakeholders semakin meluas dan akhirnya digunakan sebagai ungkapan model ini. Slamet (2003) menjelaskan bahwa upaya pengembangan pedesaan melalui langkah perencanaan partisipasi perlu dilekatkan dengan bermacam cara yaitu sebagai berikut: (1) pencarian potensi-potensi bisa dibangun oleh masyarakat setempat, (2) pembinaan teknologi tepat guna yang meliputi penciptaan, pengembangan, penyebaran sampai digunakannya teknologi itu oleh masyarakat pedesaan, (3) penyuluhan organisasi usaha atau unit pengelola yang melakukan penerapan berbagai teknologi tepat guna untuk mencapai tujuan pembangunan, (4) pembinaan organisasi pembina atau pendukung, menyambungkan usaha pembangunan yang dilakukan oleh warga masyarakat pedesaan dengan lembaga lain atau dengan tingkat yang lebih tinggi (Kota,

Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, Nasional), (5) pembinaan kebijaksanaan penyokong, yaitu yang meliputi input, biaya kredit, target, pasaran, dan lain-lain yang memberi iklim serasi untuk pembangunan.

Menurut Cahyono (2006) proses perencanaan pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat harus memperhatikan adanya kepentingan rakyat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga itu dalam proses perencanaan pembangunan partisipasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain yakni: (1) perencanaan kegiatan wajib dilandasi fakta dan realita di masyarakat, (2) kegiatan wajib mempertimbangkan kesanggupan masyarakat dari sudut teknik, ekonomi dan sosialnya, (3) kegiatan wajib menilik faktor kebutuhan kelompok dalam masyarakat, (4) keikutsertaan masyarakat dalam penganjantahan kegiatan (5) penyangkutan sedalam mungkin organisasi-organisasi yang ada, (6) kegiatan sebaiknya bermuatan program jangka pendek dan jangka panjang, (7) memberi keluasan untuk penilaian, dan (8) kegiatan harus memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat dan tenaga (KUWAT) yang tersedia.

Cara-cara yang dipakai dalam proses perencanaan keikutsertaan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

**a. *Participatory Rural Appraisal (PRA)***

Pendekatan, metode dan teknik *Participatory Rural Appraisal (PRA)* membesar pada periode 1990-an. *Participatory Rural Appraisal (PRA)* adalah suatu cara kesadaran tempat dengan cara belajar dari, untuk dan bersama dengan masyarakat untuk memahami, menganalisa dan menilai kendala dan kesempatan melalui multi-disiplin dan kemahiran untuk menata informasi dan pengambilan keputusan selaras dengan kebutuhan. PRA memiliki beberapa teknik untuk menghimpun dan menjabar data. Teknik ini bertugas untuk menumbuhkan keikutsertaan masyarakat. Teknik-teknik PRA antara lain sebagai berikut:

**b. *Secondary Data Review (SDR) Review Data Sekunder***

Cara menghimpun sumber-sumber informasi yang telah disebarkan maupun yang belum diterbitkan. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memperoleh dan mempelajari data manakah yang telah ada sehingga tidak butuh untuk dihimpun lagi.

### **c. *Direct Observation* - Observasi Langsung**

*Direct Observation* merupakan program pemantauan langsung pada obyek-obyek tertentu, kejadian, proses, ikatan-ikatan masyarakat dan mendokumentasikannya. Tujuan dari cara ini ialah untuk memastikan jawaban-jawaban yang diberikan masyarakat.

### **d. *Semi Structured Interviewing* (SSI)**

Wawancara semi terstruktur. Teknik ini merupakan wawancara yang memakai gabungan pertanyaan secara bertahap yang hanya merupakan panduan terbuka dan masih mungkin untuk melebar selama interview berlangsung. SSI dapat dilaksanakan bersama seseorang yang dianggap menyulih informasi, misalnya wanita, pria, anak-anak, pemuda, petani, pejabat lokal.

### **e. *Focus Group Discussion* (diskusi kelompok terfokus)**

Cara ini adalah diskusi antara beberapa orang untuk membahas hal-hal bersifat khusus secara intim. Tujuannya untuk mendapatkan deskripsi terhadap suatu masalah tertentu secara terperinci.

### **f. *Preference Ranking and Scoring***

Cara untuk memperoleh secara tepat masalah-masalah inti dan alternative-alternatif masyarakat. Tujuan dari cara ini adalah untuk mengerti lebih intens preferensi-

preferensi kehidupan masyarakat agar tidak sulit untuk dipertimbangkan.

#### **g. Direct Matrix Ranking**

Suatu pola ranking yang menggambarkan daftar ciri obyek tertentu. Tujuannya untuk mendalami alasan terhadap alternative-alternatif masyarakat, misalnya mengapa mereka lebih memilih menanam pohon pisang dibandingkan dengan pohon yang lain. Ciri ini bias jadi tidak sama dari satu individu dengan individu lain, misalnya pendapat wanita dan pria mengenai tanaman sayur.

#### **h. Peringkat Kesejahteraan**

Rangking Kesejahteraan Masyarakat di suatu lokasi tertentu. Tujuannya untuk mendapatkan deskripsi riwayat keadaan sosio-ekonomis melalui cara menggali tanggapan perbedaan-perbedaan ketenteraman antara satu keluarga dan keluarga yang lainnya dan kesenjangan di masyarakat, memperoleh *indicator-indikator* lokal tentang kesejahteraan.

#### **i. Pemetaan Sosial**

Teknik ini merupakan cara untuk menghasilkan gambaran keadaan sosial-ekonomi masyarakat, contoh gambar letak pemukiman, sumber-sumber mata pencaharian, peternakan, jalan, dan sarana-sarana umum.

Hasil pemetaan ini diwujudkan dalam bentuk peta umum sebuah tempat yang mendeskripsikan keadaan masyarakat maupun lingkungan fisik.

**j. Transek (Penelusuran)**

Transek adalah cara eksplorasi informasi dan sarana pemahaman daerah menggunakan teknik penjajakan dengan berjalan melalui garis yang membujur dari suatu sudut ke sudut lain di daerah tertentu.

**k. Kalender Musim**

Merupakan penjelajahan kegiatan musiman mengenai kondisi-kondisi dan problematika yang berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu (musiman) di masyarakat. Maksud dari cara ini untuk memudahkan kegiatan pencarian informasi dalam memahami bentuk kehidupan masyarakat, program, kendala-kendala, konsentrasi masyarakat terhadap suatu topik tertentu, mendalami bentuk pemanfaatan waktu, sehingga ditemukan kapan saat-saat sibuk dan saat-saat waktu luang.

**1. Alur Sejarah**

Alur sejarah merupakan suatu cara yang dipakai untuk memahami peristiwa-peristiwa dari suatu waktu sampai kondisi saat ini dalam sudut pandang orang

setempat. Maksud dari teknik ini adalah untuk mendapatkan deskripsi tentang topik-topik penting di masyarakat.

#### **m. Analisa Mata Pencaharian**

Masyarakat akan terbina untuk membahas kehidupan mereka dari sudut mata pencaharian. Maksud dari cara ini yakni menyediakan latar belakang dan analisa terhadap jenis pekerjaan, pembagian kerja pria dan wanita, daya, kesempatan, dan tantangan.

#### **n. Diagram Venn**

Teknik ini ialah untuk memahami jalinan institusional dengan masyarakat. Tujuannya untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh masing-masing instansi dalam kehidupan masyarakat juga untuk mengetahui keinginan-keinginan apa dari masyarakat terhadap instansi-instansi tersebut.

#### **o. Kecenderungan dan Perubahan**

Teknik ini adalah cara untuk menafsirkan kecondongan dan perubahan yang berlaku di masyarakat dan wilayahnya dalam kurun waktu tertentu. Maksudnya untuk menelaah perkembangan bidang-bidang tertentu dan metamorfosis-metamorfosis apa yang berlaku di masyarakat dan wilayahnyanya.

## **2. Kaji-Tindak Partisipatif (KTP) Agusta (2005)**

Menyatakan bahwa Kaji-Tindak Partisipatif (KTP) adalah istilah program sedangkan esensinya menunjuk pada metodologi Participatory Learning and Action (PLA) atau belajar dari bertindak secara partisipatif, belajar dan bertindak bersama, aksi-refleksi partisipatif.

Penggunaan terminologi PLA dimaksudkan untuk memusatkan pemaknaan partisipatif pada tahapan belajar bersama masyarakat untuk pengembangan. Kaji-Tindak Partisipatif, dan nama program menggambarkan suatu dialektika yang aktif antara analisis penelitian dan perbuatan secara tak terpisahkan. Kajian partisipatif menjadi dasar bagi tindakan partisipatif.

Jika dari suatu perbuatan teranalisis masih didapati halangan dan rintangan, maka analisis partisipatif dikaji kembali untuk memperoleh solusi, demikian seterusnya. Suatu analisis partisipatif dalam masyarakat menempatkan semua pihak yang berperan aktif dalam keikutsertaannya apakah sebagai petani, nelayan, pedagang, aparat desa, atau petugas pelayan masyarakat dalam kedudukan yang seimbang fungsional, dan menjauh dari adanya golongan yang mempunyai kedudukan khusus dalam menganalisis dan memutuskan proses dan hasil kajian.

### **3. *Participatory Research and Development (PRD)***

Penelitian mengenai keikutsertaan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai fokus terhadap usaha menolong anggota masyarakat yang memiliki minat yang sama untuk berkoperasi, menelusuri kebutuhan bersama dan lalu melaksanakan program bersama untuk mengadakan kebutuhan tersebut. *Participatory Research and Development (PRD)* yang merupakan bentuk riil dari pengembangan masyarakat acap kali diaplikasikan dalam wujud (a) proyek-proyek pembangunan yang membolehkan anggota masyarakat mendapatkan sokongan dalam memenuhi kebutuhannya, dan (b) melalui gelakan dan aksi sosial yang bias jadi kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggungjawab (Suharto, 2002).

### **4. *Rapid Rural Appraisal (RRA) Pada akhir 1970-an***

Teknik RRA mulai digunakan dan pada akhir tahun 1980-an sudah diterima secara akademis. Adanya ketidakpuasan penggunaan kuisisioner pada metode penelitian konvensional merupakan alasan mengapa teknik RRA bias berkembang. Kuisisioner acap kali memperoleh suatu hasil yang tidak selesai dan informasi yang didapatkan juga tidak meyakinkan.

Di samping itu, adanya bias dalam menilai kaum miskin, pada tahap penelitian konvensional. Misalnya, kuisisioner hanya memandang masyarakat kelas atas, orang berpendidikan tinggi dan kurang merapat pada masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. Pendekatan dalam RRA hampir sama dengan PRA antara lain : *“secondary data review, direct observation, semi-structured interview, workshop dan brainstorming, transect, mapping, ranking and scoring, developing chronologies of local events, dan case studies.*

Perbedaan yang signifikan dari kedua pendekatan ini adalah dari sudut keikutsertaan masyarakat. Dalam RRA, informasi didapatkan oleh pihak luar (outsiders), lalu data dibawa pergi, ditelaah dan peneliti tersebut membuat desain tanpa melibatkan masyarakat. Rapid Rural Appraisal (RRA) lebih bersifat penggalian informasi, sedangkan Participatory Rural Appraisal (PRA) dilaksanakan secara bersama-sama dengan masyarakat (let them do it), mulai dari pengumpulan informasi, analisis sampai pada perencanaan program.

### **5. Participatory Action Research (PAR)**

Teori *Participatory Action Research (PAR)* dimulai dengan pengungkapan-pengungkapan dan penguraian

secara rasional dan kritis terhadap praktek-praktek sosial mereka. Dari kesemua prinsip-prinsip PAR yang terpenting adalah tidak mewajibkan menulis dan memproses catatan rekaman yang menerangkan apa yang sedang terjadi seakurat mungkin, akan tetapi merupakan analisis kritis terhadap situasi yang secara kelembagaan diciptakan, seperti: melalui proyek-proyek, program-program tertentu atau sistem. Salah satu kaidah dalam PAR yang paling khas adalah membuat pengalaman-pengalaman mereka sendiri sebagai objek analisis (objectifying their own experience).

Menurut Mahmudi (2004), ada sejumlah akidah PAR yang yang harus dimengerti terlebih dahulu, yaitu: PAR harus diletakkan sebagai suatu pendekatan untuk memperbaiki praktek-praktek sosial dengan cara merubahnya dan belajar dari akibat-akibat dari perubahan tersebut. secara keseluruhan merupakan partisipasi yang murni (autentik) dimana akan membentuk sebuah spiral yang berkesinambungan sejak dari perencanaan (planing), tindakan (pelaksanaan atas rencana), observasi (evaluasi atas pelaksanaan rencana), refleksi (teoritisi pengalaman).

PAR merupakan kerjasama (kolaborasi), semua yang memiliki tanggungjawab atas tindakan perubahan dilibatkan dalam upaya-upaya meningkatkan kemampuan mereka. PAR merupakan suatu proses membangun pemahaman yang sistematis (systematic learning process), merupakan proses penggunaan kecerdasan kritis saling mendiskusikan tindakan mereka dan mengembangkannya, sehingga tindakan sosial mereka akan dapat benar-benar berpengaruh terhadap perubahan sosial. PAR suatu proses yang melibatkan semua orang dalam teoritisasi atas pengalaman-pengalaman mereka sendiri.

## **6. Pemahaman Partisipatif Kondisi Pedesaan (PPKP)**

Menurut Saharia (2003), metode PPKP adalah “salah satu metode perencanaan partisipatif yang bertujuan untuk menggali permasalahan yang ada di masyarakat, penyebab terjadinya masalah, dan cara mengatasinya dengan menggunakan sumberdaya lokal atas prinsip pemberdayaan masyarakat” yang acuannya sebagai berikut: Mengumpulkan informasi yang dilakukan oleh petani sendiri.

Muatan informasi ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain atau suatu lembaga yang akan menyokong petani. Mempelajari keadaan dan aktivitas pedesaan dari dan oleh masyarakat desa untuk silih berganti, terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penanganan serta tidak lanjutnya. Informasi yang didapatkan dengan Metode PPKP bias dimanfaatkan sebagai materi perencanaan program dalam pembangunan masyarakat desa (petani).

Metode PPKP ini dijalankan oleh pengambil kebijakan bersama petani, kelompok pendamping lapangan, dan dari segi pemerintah desa. Dalam Metode PPKP ini kelompok pendamping lapangan hanya sebatas penyedia.

### ***7. Participatory Learning Methods (PLM)***

Menurut Thoyib (2007), model pembelajaran partisipatif sebenarnya menekankan pada proses pembelajaran, di mana kegiatan belajar dalam pelatihan dibangun atas dasar partisipatif (keikutsertaan) peserta pelatihan dalam semua aspek kegiatan pelatihan, mulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan, sampai pada tahap menilai kegiatan pembelajaran dalam pelatihan.

Upaya yang dijalankan pembimbing pada dasarnya lebih difokuskan pada dukungan dan melibatkan program peserta. Di awal program pelatihan, intensitas peranan pelatih adalah tinggi. Tugas ini dipaparkan dalam membantu peserta dengan menyediakan informasi tentang bahan ajar (bahan latihan) dan dengan melakukan dorongan dan latihan kepada peserta.

Intensitas program pelatih (sumber) makin lama makin berkurang, sehingga tugasnya lebih difokuskan untuk mengamati dan memberikan umpan balik terhadap program pelatihan dan sebaliknya pada awal program aktivitas peserta rendah, kegiatan awal ini digunakan hanya untuk menerima materi pelatihan, informasi, petunjuk, bahan-bahan, langkah-langkah kegiatan. Kemudian keikutsertaan warga makin lama makin padat dan aktif menjadikan kondisi pelatihan yang lebih berarti.

Beberapa teknik yang dapat dipergunakan pada *participatory Learning Methods (PLM)* ini adalah: Teknik dalam tahap pembinaan keakraban : teknik diad, teknik pembentukan kelompok kecil, teknik penyaluran belajar secara kelompok, teknik bujur sangkar terpecah Teknik yang dipakai pada tahap identifikasi : tukar pendapat, dan wawancara Teknik dalam tahap perumusan tujuan: teknik

Delphi dan diskusi kelompok (round table discussion) Teknik pada tahap penyusunan program adalah : teknik pemilihan cepat (Q-shot technique) dan teknik perancangan program Teknik yang dapat dipergunakan dalam proses pelatihan : Simulasi, studi kasus, cerita pemula diskusi (discussion starter story), buzz group, pemecahan masalah kritis, forum, role play, magang, kunjungan lapangan, dan lain-lain.

Teknik yang dapat dipergunakan dalam penilaian proses pelatihan, hasil dan pengaruh kegiatan : respon terinci, cawan ikan (fish bowl technique) dan pengajuan pendapat tertulis.

### **8. *Methodology Participatory Assessment (MPA)***

Menurut Dayal et al. (2000) *Methodology for Participatory Assessments* (MPA) adalah metode yang dikembangkan untuk menjalankan penilaian suatu proyek pembangunan masyarakat (*community development*).

MPA merupakan alat yang berguna bagi pembuat kebijakan, manajer program dan masyarakat, sehingga masyarakat setempat dapat memantau kesinambungan pembangunan dan mengambil tindakan yang diperlukan agar menjadi semakin baik. Metodologi tersebut menerangkan bagaimana caranya kaum perempuan dan

keluarga yang kurang mampu bias berperan aktif, dan memperoleh faedah dari pembangunan, bersama-sama dengan kaum lelaki dan keluarga dimana mereka berada. *Methodology for Participatory Assessments (MPA)* merupakan pengembangan dari pendekatan partisipatif.

Misalnya, PRA yang merupakan instrumen dan metode yang selama kurun waktu yang lama telah teruji keampuhannya untuk membuat masyarakat ikut serta. MPA mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: MPA adalah langkah yang diperuntukkan baik kepada institusi pelaksana maupun kepada masyarakat agar memperoleh keadaan pengelolaan sarana yang berkesinambungan dan digunakan secara efektif.

Dirancang sedemikian rupa hingga mengikutsertakan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) utama dan mengkaji keberadaan masyarakat yang mempunyai 4 komponen inti: lelaki miskin, perempuan miskin, lelaki kaya, perempuan kaya. MPA memanfaatkan satu set parameter yang "*sector specific*" untuk mengukur kontinuitas, kebutuhan, jenis kelamin dan sensibilitas akan kemiskinan.

Masing-masing ditaksir dengan memakai urutan alat partisipatif pada masyarakat, institusi pelaksana dan penentu kebijakan. Hasil dari evaluasi pada tingkat masyarakat diwakili oleh wakil-wakil masyarakat pengguna dan institusi pelaksana ke dalam rapat pihak berkepentingan (*stakeholder*), dengan maksud untuk secara bersama menganalisis aspek-aspek kelembagaan yang berdampak pada proyek dan kelanjutan pada level lapangan.

Hasil dari evaluasi kelembagaan dipakai untuk melaksanakan pemantauan ulang atas keputusan pada tingkat kegiatan atau tingkat nasional. MPA merumuskan beberapa data kualitatif tingkat desa, setengahnya bisa dikuantitatifkan ke dalam sistem ordinal oleh masyarakat desa itu sendiri. Data kuantitatif ini dapat dianalisis secara statistik. Dengan cara ini kita dapat mengadakan analisis antar masyarakat, antar proyek dan antar waktu, serta pada tingkat program. Dengan demikian MPA dapat digunakan untuk menghasilkan informasi manajemen untuk proyek skala besar dan data yang sesuai untuk analisis program.

## **B. Unsur-Unsur Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat merupakan prosedur untuk menyediakan dan mendukung masyarakat agar bias memposisikan diri secara proporsional dan menjadi pemeran utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mempertoleh suatu keberlanjutan dalam kurun waktu yang lama (Supriyanto dan Subejo, 2004).

Pemberdayaan masyarakat mempunyai hubungan erat dengan sustainable development dimana pemberdayaan masyarakat adalah suatu prasyarat inti serta bisa dimisalkan sebagai pintu yang akan menggiring masyarakat menapaki suatu kesinambungan hidup secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Menurut Herry Darwanto (2003), pemberdayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak.

Bagi masyarakat miskin, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara (voicelessness) dan ketidak berdayaan (powerlessness) dalam hubungannya dengan negara dan pasar. Karena kemiskinan adalah multi dimensi, masyarakat miskin membutuhkan kemampuan pada tingkat individu (seperti kesehatan, pendidikan dan perumahan) dan pada tingkat

kolektif (seperti bertindak bersama untuk mengatasi masalah).

Memanfaatkan masyarakat miskin dan terbelakang menuntut usaha meniadakan alasan ketidakmampuan mereka meninggikan kualitas hidupnya. Masyarakat umumnya memiliki institusi lokal baik yang dibentuk oleh pemerintah lokal maupun tumbuh alami berdasarkan kesepakatan warga masyarakat sendiri yang sebenarnya dapat dikaitkan dengan usaha-usaha kerjasama produktif.

Kegagalan pengelolaan kelompok masyarakat untuk upaya kerja acap kali terjadi sebab dalam banyak persoalan, hal tersebut sering dilatabelakngi oleh sasaran-sasaran keproyekan, biasanya setelah proyek usai maka kelompok yang terbentuk juga akan bubar. Pada sejumlah masyarakat lokal, telah berkembang sejumlah instansi tradisional yang selama ini telah digunakna sebagai fasilitas untuk menggapai program kerja yang lebih efektif diselaraskan dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki dan ataudikuasai oleh masyarakat setempat.

Unsur-unsur pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah sebagai berikut: (1) inklusi dan keikutsertaan; (2) saluran informasi; (3) daya tampung organisasi lokal; dan (4) profesionalitas pemeran

pemberdaya. Keempat elemen tersebut terhubung satu sama lain dan saling menunjang. Inklusi bertitik pada persoalan siapa yang diberdayakan, sedangkan keikutsertaan bertitik pada bagaimana mereka diberdayakan dan tugas apa yang mereka perankan sesuai mereka menjadi bagian dari kelompok yang diberdayakan.

Menyediakan tempat keikutsertaan bagi masyarakat, utamanya masyarakat miskin, dalam pembangunan adalah mendukung mereka daulat dan kendali atas keputusan tentang sumber-sumber pembangunan. Keikutsertaan masyarakat miskin dalam memutuskan intisari pembangunan pada tingkat nasional maupun daerah dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban bahwa sumber daya pembangunan (dana, prasarana/sarana, tenaga ahli, dll) yang seadanya secara nasional maupun pada tingkat daerah diperuntukkan sesuai dengan keperluan dan prerogatif masyarakat miskin tersebut.

Keikutsertaan yang tidak tepat adalah mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan hanya untuk dipakai suaranya tanpa betul-betul menyediakan kesempatan bagi mereka untuk ikut menyepakati keputusan. Pemerolehan keputusan yang partisipatif tidak

selalu dinamis dan acap kali ada banyak prerogatif yang wajib dipilih, oleh sebab itu mekanisme resolusi konflik kepentingan harus dikuasai oleh pemerintah guna mengelola ketidak-sepakatan.

Ada berbagai bentuk partisipasi, yaitu: secara langsung, dengan perwakilan (yaitu memilih wakil dari kelompok-kelompok masyarakat), secara politis (yaitu melalui pemilihan terhadap mereka yang mencalonkan diri untuk mewakili mereka), berbasis informasi (yaitu dengan data yang diolah dan dilaporkan kepada pengambil keputusan), berbasis mekanisme pasar yang kompetitif (misalnya dengan pembayaran terhadap jasa yang diterima).

Partisipasi langsung oleh setiap anggota masyarakat adalah tidak sesuai kenyataan, kecuali pada masyarakat yang total penduduknya sedikit, atau untuk mendapatkan keputusan-keputusan kenegaraan yang dilandasi secara referendum. Biasanya dilakukan keikutsertaan secara tidak langsung, oleh perwakilan masyarakat atau beralaskan informasi dan mekanisme pasar.

Organisasi berlandaskan masyarakat sebagai contoh lembaga riset, LSM, organisasi keagamaan, dll. Memiliki tugas penting dalam membawa suara masyarakat miskin

untuk didengar oleh penentu keputusan tingkat nasional dan daerah. Meskipun keterwakilan sudah dilaksanakan dengan benar, jalan keikutsertaan masih belum benar jika berlangsungnya dilakukan secara tidak serius.

Upaya yang didasari kejujuran untuk mengapresiasi gagasan masyarakat terhadap kebijakan yang berhubungan dengan ruang hidup mereka bias saja gagal, jika gagasan perwakilan masyarakat yang diharapkan menyllih kepentingan semua elemen masyarakat itu kemudian hanya dijalankan dengan tidak sepenuh hati, tanpa usaha mengerti pertimbangan apa dibalik pendapat yang disampaikan wakil-wakil tersebut.

Keikutsertaan semu seperti itu memperbanyak biaya pembangunan, tanpa ada kegunaan yang nyata bagi peserta yang diajak ikutserta. Upaya menyangkutkan masyarakat dalam pemaknaan yang benar adalah memberi masyarakat wewenang untuk menetapkan sendiri hal-hal yang menurut mereka berarti dalam kehidupan mereka. Elemn ke dua, saluran informasi, adalah aliran informasi yang tidak terhalang antara masyarakat dengan masyarakat lain dan antara masyarakat dengan pemerintah.

Informasi mencakup ilmu pengetahuan, kegiatan dan hasil kerja pemerintah, hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, ketetapan tentang pelayanan umum, perluasan permintaan dan penawaran pasar, dsb. Masyarakat pedesaan terpencil tidak memiliki jalan terhadap semua informasi tersebut, karena kendala bahasa, budaya dan jarak lokasi. Masyarakat yang informatif, memiliki kedudukan yang baik untuk mendapatkan manfaat dari kesempatan yang ada, menggunakan jalan tersebut untuk pelayanan umum, memanfaatkan hak-haknya, dan menjadikan pemerintah dan pihak-pihak lain yang ikut seras bersikap akuntabel atas kebijakan dan tindakan yang mengubah kehidupan masyarakat.

Kekuatan instansi lokal adalah kesanggupan masyarakat untuk bekerja bersama, mengelola atau mengatur perorangan dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya, mengerahkan sumber-sumber daya yang ada untuk mengantisipasi persoalan bersama. Masyarakat yang terorganisir, lebih bisa menjadikan suaranya terdengar dan kebutuhannya tertutupi. Profesionalitas pemeran pemberdaya adalah kesanggupan pemeran pemberdaya, yaitu aparat pemerintah atau LSM, untuk menampung, memahami, mendampingi dan melaksanakan tindakan

yang dibutuhkan untuk melayani prioritas masyarakat.

Pemeran pemberdaya juga harus sanggup mempertanggungjawabkan keputusan dan perbuatannya yang mengubah kehidupan masyarakat.

### **C. Pemberdayaan sebagai Alternatif Pembangunan Masyarakat**

Pada web site *Empowermentillustrated.com* dijelaskan mengenai pemberdayaan, dimana istilah pemberdayaan muncul pertama kali pada saat aktivis gerakan *black panther* memobilisasi politik di USA pada tahun 1960, dan pada pertengahan tahun 80-an kaum wanita mempopulerkan kembali konsep pemberdayaan.

Kini konsep pemberdayaan telah masuk pada berbagai disiplin ilmu baik pada tataran teori maupun praktek dan telah menjadi kata plastis yang digunakan dalam berbagai konteks, sehingga kehilangan makna yang sebenarnya. Pemberdayaan adalah terjemahan dari kata *empowerment*, di Indonesia sendiri mulai populer pada tahun 1998 dan terus berkembang pada era reformasi.

Menurut kamus *Oxford* kata *empower* sama artinya dengan memberi kekuatan atau kekuasaan kepada. Sedangkan *to empower* sinonim dengan *to authorize*,

*commission, delegate, enable, entitle, licence, qualify.* Selanjutnya, kamus Merriam Webster online menyamakan *empower* dengan: (1) *to give official authority or legal power to*, (2) *to enable*, atau (3) *to promote the self-actualization or influence of*. Sedangkan Yourdictionary.com menyamakan *to empower* dengan: (1) *to invest with power, especially legal power or official authority*, atau (2) *to equip or supply with an ability*.

Berdasarkan uraian di atas, maka pemberdayaan ialah usaha untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang sehingga bisa membantu diri mereka sendiri. Sedangkan Narayan (2002), mengartikan pemberdayaan yang menunjuk pada pilihan untuk mengembangkan kebebasan seluas-luasnya dan tindakan dalam kehidupan seseorang. Selanjutnya dikemukakan bahwa pemberdayaan adalah pengembangan aset-aset dan kapasitas penduduk miskin tidak berdaya untuk berpartisipasi dalam bernegosiasi, mempengaruhi, mengontrol dan mempertahankan tanggungjawab institusi terhadap efek kehidupan mereka.

Sebenarnya pemberdayaan selalu berhubungan dengan kekuasaan, dimana dikelompokkan sebagai faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut: (1) *Power over*:

Kekuasaan untuk mengatur seseorang atau sesuatu. Respon pada kekuasaan ini bisa berupa kepatuhan, penolakan atau manipulasi. (2) *Power to*. Kekuasaan yang bersifat generatif atau produktif yang menciptakan peluang dan aksi tanpa dominasi, (3) *Power with*. Kekuasaan yang menimbulkan suatu perasaan bahwa keseluruhan itu lebih besar dari jumlah seluruh individu yang ada dan aksi kelompok lebih efektif, dan (4) *Power from within*. Suatu perasaan adanya kekuatan dalam setiap orang. Pengakuan pada penerimaan dan penghargaan pada diri sendiri memungkinkan penerimaan orang lain sebagai sesama.

Selain faktor kekuasaan tadi, pemberdayaan juga melibatkan aspek kognitif, psikologis, ekonomi dan politik. Dimana aspek kognitif menunjukkan kemampuan *stake holders* untuk mengerti kondisi subordinasi dalam masyarakat pada tingkat mikro maupun makro, dan juga kesanggupan membuat keputusan untuk mengubah kebudayaan dan norma yang menghambat perkembangan mereka.

Aspek psikologis menunjukkan kemampuan *stake holders* untuk meningkatkan sikap bahwa mereka sanggup membenasi situasi dan akan sukses. Sedangkan aspek

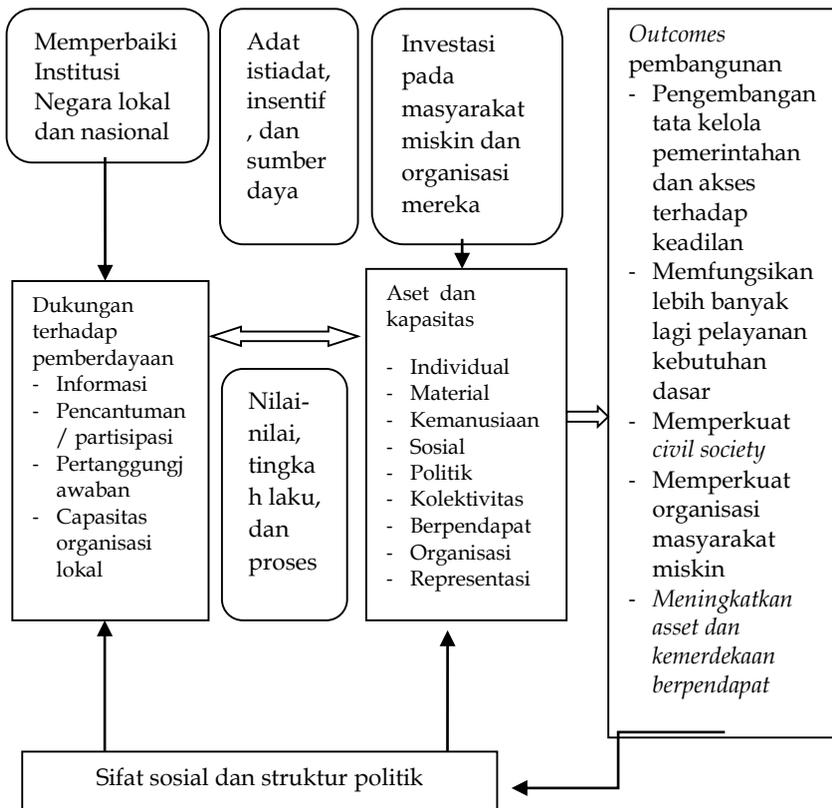
ekonomi menunjukkan bahwa stake holders harus memiliki aktivitas yang produktif agar memiliki penghasilan dan otonomi keuangan untuk mengurangi ketergantungan pada pihak lain, dan Aspek politik menunjukkan kapasitas stakeholders untuk mengkaji kondisi sosial-politik dan kesanggupan mereka mengelola dan memobilisasi rekan-rekannya untuk melakukan perubahan sosial. Praksis pemberdayaan memerlukan kondisi yang dapat membantu mempercepat prosesnya.

Kondisi tersebut bisa berjalan secara simultan dan saling mendukung dalam program pembangunan dengan menggunakan pendekatan konsep empowerment. Kondisi tersebut sebagai berikut: (1) kemandirian masyarakat lokal, otonomi dalam pembuatan keputusan pada tingkat desa, dan partisipasi langsung yang demokratis dalam proses pemerintahan melalui perwakilan, (2) adanya ruang bagi ekspresi budaya dan kesejahteraan spiritual dan experiential social learning, (3) akses pada lahan dan sumber daya lain, pendidikan untuk perubahan, dan perumahan dan fasilitas kesehatan, (5) akses pada pengetahuan dan ketrampilan (internal maupun external) untuk menjaga stok modal alami dan lingkungan secara sinambung, (6) akses pada pelatihan ketrampilan, teknik-

teknik pemecahan masalah, teknologi tepat guna dan informasi, dan (6) partisipasi dalam proses pembuatan keputusan oleh semua orang.

Di dalam buku yang ditulis Narayan (2002), pemberdayaan dalam aplikasinya difokuskan pada kerangka kerja (*framework*) dalam lima hal, yaitu sebagai berikut: (1) ketentuan pelayanan dasar, (2) pengembangan tata pemerintahan lokal, (3) pengembangan tata pemerintahan nasional, (4) pengembangan pasar pro masyarakat miskin (*pro-poor*), dan (5) Akses masyarakat miskin terhadap keadilan.

Sebagai upaya kita untuk lebih mendalami kerangka kerja pemberdayaan yang ditawarkan oleh Narayan, yang digambarkan dalam ringkasan kerangka kerjanya pada gambar 4.1 diperlihatkan pemetaan hubungan antara institusi, pemberdayaan dan pengembangan hasil pembangunan, sebagai fakta-fakta untuk masyarakat miskin, maka dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4.1 Ringkasan Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Ringkasan kerja pemberdayaan masyarakat upaya memahami konsep pemberdayaan seperti yang digambarkan di atas adalah sebagai tawaran dari teori pembangunan kontemporer. Teori pemberdayaan sebagai anti tesis dari modernisasi yang banyak meninggalkan

begkalai pembangunan, terutama bengkalai pemerataan dan keadilan kesejahteraan. Jika ditilik lebih jauh pemberdayaan sebagai bagian dari pembangunan kontemporer dengan semangat yang mendasarinya, seperti yang dikemukakan Dharmawan (2000), yaitu; partisipasi, demokrasi, kesejahteraan, kolektivitas dan pembangunan yang diinisiasi dari dalam, maka kita dapat mengatakan sesuai dengan perkembangan masyarakat di Indonesia, konsep pemberdayaan dapat merupakan tawaran terbaik dari dari beberapa mazhab pembangunan yang ada sekarang ini untuk ransformasi sosial masyarakat pedesaan.

Apabila kita lihat turunan teori dari mazhab post-modernisme, seperti; teori pemberdayaan, partisipasi social, pembebasan, pluralism, dan pembangunan yang berpusat pada masyarakat (*people -centered development*), maka tentu saja posisi penting dari konsep gerakan sosial, komunikasi public, partisipasi sosial, rekonstruksi pengetahuan dan perspektif konflik terdapat rana teoritis dan praksis.

Dilihat dari turunan teorinya post-modernisme sesungguhnya akar teorinya secara umum adalah marxis yang lebih kental dengan perlawanan dan atau

pemberontakan terhadap tatanan yang dianggapnya tidak sesuai dengan tujuannya, sehingga konsep-konsep yang disebutkan memiliki posisi penting dalam rana teori dan praksis. bergeser ke arah pendekatan ekonomi, tekanannya pada perkembangan ekonomi yang menjadi tumpuan dari pembangunan; yang menjadi aktornya adalah pasar dan pengusaha dengan mekanisme kekuasaan dan ekonomi, sedangkan idiologinya adalah liberal selanjutnya ke pendekatan moral, dimana pendekatan ini yang bertindak sebagai aktor adalah komunitas lokal dan/atau rakyat, dengan mekanisme kekuasaan dan rakyat, sedangkan idiologinya adalah *populis community development*. Baik dimaknai sebagai pengembangan kapasitas maupun kapabilitas dalam sebuah masyarakat (partisipasi dan pemberdayaan).

## Daftar Pustaka

- Adi RS. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Lembaga Penerbit. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Amien Mappadjantji 2001, *Realitas Dunia Kuantum Implikasinya Terhadap Sistem Pendidikan dan Konsep Pembangunan*, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin, Rabu, 27 Oktober 2001 : Makassar.
- Agusta I. 2007. *Aneka Metode Partisipasi Untuk Pembangunan Desa*. Blogspot <http://iagusta.blogspot.com/>. Di akses, 2 November 2007.
- Arief B. 2000. *Toeri Pembangunan Dunia Ketiga*. PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Aristo DA. 2004. *Rejuvinasi Peran Perencana Dalam Menghadapi Era Perencanaan Partisipatif "Sebuah Tahapan Awal dalam Pembentukan Kultur Masyarakat Partisipatif"*. Disampaikan Dalam : Seminar Tahunan ASPI (Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia) Universitas Brawijaya, Malang Juli 2004. Teknik Planologi ITB.
- Asngari PS. 2001. *Peranan Agen Pembaruan/ Penyuluh Dalam Usaha Memberdayakan (Empowerment) Sumberdaya Manusia Pengelola Agribisnis*. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu Sosial Ekonomi. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor.
- Badaruddin S. 2009. *Pengertian Pembangunan*. <http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/> Di akses 18 Oktober 2010.

- Cahyono BY. 2006. *Metode Pendekatan Sosial Dalam Pembangunan Partisipatif*.  
lppm.petra.ac.id/ppm/COP/download. Di akses, 2 November 2007.
- Carry Lee J. 1976. *Community Development : As A Process*,  
University of Missouri Press : Columbia.
- Castles S. 2001. *Studying Social Transformation*.  
International Political Science Review. Vol 22, No 1.  
Pp 13-32.
- Dayal R. Christine van Wijk dan Nilanjana Mukherjee.  
2000. *Methodology for Participatory Assessments with  
Communities, Institutions and Policy Makers*.  
<http://www.waspola.org/default/policy/web>. Di  
akses, 2 November 2007
- Dharmawan AH. 2000. *Pendekatan-Pendekatan Pembangunan  
Pedesaan dan Pertanian: Klasik dan Kontemporer*.  
Makalah yang Disampaikan Pada Acara "Apresiasi  
Perencanaan Pembangunan Pertanian Daerah bagi  
Tenaga Pemandu Teknologi Mendukung Prima  
Tani" Tanggal 19-25 November 2006.
- Empowermentillustrated.com. "*Empowerment Illustrated:  
Theory of Empowerment Archives*." *theory of  
empowerment.html*
- Herry Darwanto. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan  
Berbasis Masyarakat Terpencil*. Bappenas.  
Jakarta.
- Khairuddin. 1992. *Pembangunan Masyarakat. Tinjauan  
Aspek; Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan*. Liberty.  
Yogyakarta.

- Larrain, Jorge, *Theories of Development : Capitalism, Colonialism and Dependency*, Polity Press : Cambridge CB2 IUR.UK, 1994.
- Mosher AT. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian. Syarat-Syarat Mutlak Pembangunan dan Modernisasi*. Disadur oleh : Ir. S. Krisnandhi dan Bahrin Samad. C.V. Yasaguna. Jakarta.
- Mahmudi A. 2004. *Metode Penelitian Kritis dan Prinsip-prinsip Participatory Action Research (PAR)*. **Jurnal Inovasi Pendidikan Tinggi Agama Islam** Swara Ditperta: No. 19 Th. II, 15 November 2004. <http://www.ditperta.net/swara> . Di akses, 2 November 2007.
- Narayan D. (ed.), 2002. *Empowerment and Poverty Reduction : A Sourcebook*, The World Bank : Washington, DC.
- Ndraha T. 1990. *Membangun Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Neufeldt V dan D.B. Guralnik. 1988. *Webster's New World Dictionary of American English*. Webster's New World. New York.
- Organisasi.Org Komunitas dan Perpustakaan Online Indonesia. *Pengertian Masyarakat, Unsur Dan Kriteria Masyarakat Dalam Kehidupan Sosial Antar Manusia*. <http://organisasi.org/pengertian-masyarakat-unsur-dan-kriteria-masyarakat-dalam-kehidupan-sosial-antar-manusia>. Di akses, 18 Oktober 2010
- Pruitt D G., dan Rubin, Jeffrey Z., *Teori Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2004.
- Pieterse, JN. 1998. *My Paradigm or Yours? Alternative Development, Post Development, Reflexive*

*Development. Development and Change. Vol 29. pp 343-373*

- Rudito, B. dan Budimanta, A. 2003. *Pengelolaan Community Development*. Indonesia Center For Sustainable Development. Jakarta.
- Sa'id, G dan Intan, A.H. 2001. *Manajemen Agribisnis*. Ghalia Indonesia.
- Saharia. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat Di Pedesaan Sebagai Salah Satu Upaya Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Manusia Secara Optimal*. Makalah Individu Pengantar Falsafah Sains (PPS702). Sekolah Pascasarjana / S3 Institut Pertanian Bogor. Di akses, 3 November 2007.
- Sellamna, NE. 1999. *Relativisme in Agricultural Research and Development; Is Participation A Post Modern Concept*. ODI Working Paper No 119.
- Slamet, M. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. IPB. Press. Bogor.
- Solihin, D. 2006. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif*. Makalah disampaikan pada Pelatihan Aparatur Pemerintahan Daerah. Jakarta, 27 Desember 2006. Sekolah Tinggi Pemerintahan Abdi Negara.
- Soetomo. 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugihen B G. 2007. *Pembangunan Masyarakat*. Materi Kuliah Pembangunan Masyarakat Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Suharto E. 2002. *Metodologi Pengembangan Masyarakat*. Community work in New Zealand.

[http://www.policy.hu/suharto/modul\\_a/makindo\\_19.htm](http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_19.htm) . Di akses, 3 November 2007.

Suzetta P. 2007. *Perencanaan Pembangunan Indonesia*. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS. [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id). (pdf) Di akses, 3 November 2007.

Supriyanto dan Subejo. 2004. *Peningkatan Kompetensi Lulusan Program Penyuluhan Pembangunan dalam Menumbuhkan Kemandirian Masyarakat*. Makalah Semiloka Pengembangan Masyarakat Mandiri Pasca Sarjana IPB, Bogor 12 Agustus 2004

Tampobulon M. 2006. *Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah*. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Medan. Sumatera Utara.

Thoyib M. 2007. *Model pembelajaran partisipatif*. Website. Departemen Sosial RI. <http://www.mirror.depsos.go.id/>, Di akses, 3 November 2007.

Todaro MP. 1999. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga (Edisi Keenam)*, Penerbit Erlangga : Jakarta.

White, Robert A. 2004. *Is Empowerment the Answer? Current Theory and Research on Development Communication*. Gazette; The International Journal for Communication Studies. Vol 66 No 1. pp 7-24.



## Lampiran 1

### Perbandingan Asumsi-Asumsi Modernisme dan Post-Modernisme

Modernisme	Post-Modernisme
Manusia dan Masyarakat Alami	
Pemerintah/stabilitas/deterministik Subordinasi Ketergantungan	Kacau balau/anarki/tidak dapat diprediksi Kebebasan Otonomi/human agency
Politik	
Pembangunan sama halnya kemajuan objektif Kekuasaan terletak pada strukturnya Kelas-kelas, partai-partai Mengakar di ekonomi/sosiologi Politik adalah sebuah jarak kedudukan Politik melampui personal	Pembangunan adalah sebuah risalah Kekuasaan didefinisikan melalui hubungan/ bahasa/ strategi pemerintah Mengakar pada identitas Pergerakan sosial baru Politik adalah sebuah jarak sosial Personal adalah orang berpolitik
Peranan Ilmuwan dan Praktisi	
Menyediakan narasi/mengkreasi kebenaran ekonomi/legitimasi kekuasaan Memberikan analisis/solusi-solusi	Dekonstruksi narasi/keterhubungan pengetahuan sebagai jalan keluar/kekuatan Memudahkan komunikasi
Penyelidikan Alami	
Ilmu Pengetahuan (meta naratif) Universal/deduktif Risalah monolog Kemampuan berpikir Kepastian/deterministic Ketepatan/disagregat Pemberitahuan/mengumumkan Menegaskan kembali Continu/konstan/kesatuan Konvergen/menyederhanakan/sintesis Alternatif pengeluaran/keuntungan Fakta-fakta/ketajaman gambar-gambar	Literatur (dekonstruksi) Spesifik local/induktif Risalah dialog Keinginan besar Ambiguitas/indeterminan Ibarat/holism Mempertanyakan Subversi Tidak continu/beragam/berbentuk tunggal Divergen/kompleks/berbeda Alternatif pemasukan/keuntungan Konstruksi/kerusakan gambar-gambar

Sumber: Di Adaptasi J. Thomas; A. Escobar; D. Slater; D. Booth; S. Cobridge; M.J. Watts; T. Meppem dan R. Gill *dalam* Sellama (1990).

## Lampiran 2

### Model Pembangunan antara Modernisme (Pertumbuhan) dengan Transformasi Sosial

Faktor Pembeda	Pertumbuhan	Transformasi Sosial
Sasaran	Akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi	Kapasitas kelembagaan dan pembangunan manusia
Sumberdaya	Modal, teknologi, perdagangan, investasi asing, keahlian dari pihak luar	Keterampilan individu, sumberdaya lokal, modal sosial dan pengetahuan lokal ( <i>indigenous knowledge</i> )
Ciri-ciri	Mengedepankan Pertumbuhan	Mengedepankan Keadilan
Perantara perubahan	Mengendepankan negara, pasar&lembaga keuangan/bank	Masyarakat, komunitas, sinergi social, pemerintah, pelaku ekonomi
Epistemologi	Ilmu pengetahuan	Kritik terhadap ilmu pengetahuan dan <i>indigenous knowledge</i>
Model	Contoh dari luar, efek demonstrasi, transfer teknologi (Modern vs Tradisional)	Pembangunan dari dalam, modernisasi dari dalam, modernisasi tradisi.
Metode	Industrialisasi substitusi impor, mengedepankan pertumbuhan ekspor, inovasi	Partisipasi, kredit mikro, keberlanjutan dan demokratisasi
Kebijakan sosial	Efek menetes ke bawah ( <i>trickle down effect</i> ). Jaring pengaman	Kebijakan <i>dari bawah</i> , peningkatan kapasitas sosial melalui redistribusi sumberdaya
Kerjasama Pemb.	Bantuan, tenaga asistensi (ahli)	Kemitraan & tanggung jawab bersama
Indikator	GDP	GDP yang pro lingkungan alam , HDI dan kelembagaan yang mantap

Sumber : Pieterse, 1998.

## Sekilas tentang Penulis



Mohammad Ikbal Bahua. Lahir di Gorontalo merupakan Dosen Tetap pada Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Memperoleh Gelar Doktor pada bidang Ilmu Penyuluhan Pertanian di Institut Pertanian Bogor (IPB). Pendidikan Magister Sains pada bidang Agribisnis di Universitas Hasanuddin Makassar, dan Pendidikan Sarjana Pertanian bidang Ilmu Tanah di Universitas Sam Ratulangi Manado. Tahun 2001- 2003 menjadi Ketua Program Studi Diploma-3 Pertanian Fakultas Pendidikan MIPA IKIP Negeri Gorontalo. Tahun 2011 - 2012 menjadi Kepala Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Sibermas (KKS) Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Negeri Gorontalo. Tahun 2013 - 2014 menjadi Ketua Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2014 - sekarang (periode 2014 - 2018). Tahun 2013 - 2018 Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara. Tahun 2014 - 2019 Ketua Dewan Pakar PERHIPTANI Provinsi Gorontalo. Tahun 2013 - 2018 Ketua Pokya Ahli Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo. Tahun 2015 - 2020 Ketua Dewan Pakar KTNA Provinsi Gorontalo. Tahun 2012 pembicara pada Workshop Internasional Relationship between environments safety with REDD+ and Safeguard/Community Development (REDD+ with Safeguard Program in Boalemo Regency). Tahun 2015 Pembicara pada Simposium Nasional Penyuluhan Pembangunan Berkelanjutan.

Penghargaan Satya Lencana 10 Tahun dari Presiden Republik Indonesia tahun 2013. Penghargaan sebagai Dosen berprestasi Baik di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. Menulis pada beberapa Jurnal nasional dan Internasional antara lain:

1. Competency Development Model for gricultural Instructors in Gorontalo Province, Indonesia, pada Developing Country Studies ISSN 2224-607X (Paper) ISSN 2225-0565 (Online) [www.iiste.org](http://www.iiste.org). Vol.4, No.26, 2014. *International Journal of Agriculture Innovations and Research*. Volume 4, Issue 4, ISSN (Online) 2319-1473.
2. Kontribusi Pendapatan Agribisnis Kelapa pada Pendapatan Keluarga Petani di Kabupaten Gorontalo. Volume 3, Nomor 2 Oktober, 2014 Jurnal Agriekonomika, ISSN 2301-9948. Universitas Trunojoyo Mandura Jawa Timur.
3. Mampukah KUD Mengubah Nasib Petani? Volume 2/Nomor 36/Januari 2012 Wacana padaTabloid Inspirasi Jakarta.
4. Mampukah Petani Kita Bersaing di Tengah Pasar Global. Volume 3/Nomor 57/November 2012. Wacana depan padaTabloid Inspirasi Jakarta.
5. Assessing Professional Competencies of Agricultural Extension Workers: A Case Study of Indonesian's Agribusiness Sector. Volume 4, Issue 4, ISSN (Online) 2319-1473. *International Journal of Agriculture Innovations and Research*.
6. Farmers Community Empowerment through Institutional Strengthening of Rural Food Barn. Volume 4 Issue 2 December 2016. *International Journal of Agriculture System (IJAS)* **Nationally Accredited Journal Decree No. 51/E/KPT/2017** DOI: <http://dx.doi.org/10.20956/ijas.v4i2.689>.

7. Community Participation on Evaluation Stage in Critical Land Rehabilitation Program. 10(10) October 2016, Pages: 170-180. AENSI Journals Advances in Environmental Biology ISSN-1995-0756 EISSN-1998-1066 Journal home page: <http://www.aensiweb.net/AENSIWEB/aeb/aeb/2016/October/170-180.pdf>.
8. The level of Society's Participation in Critical Land Rehabilitation in DAS Randangan Pohuwato Regency. doi :10.1088/1755-1315/122/1/012139 IOP Publishing. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 122 (2018) 012139.
9. Pengaruh Kompetensi pada Kinerja Penyuluh Pertanian dan Dampaknya pada Perilaku Petani Jagung. <http://dx.doi.org/10.25181/prosemnas.v0i0.728>. Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Lampung 07 September 2017 ISBN 978-602-70530-6-9 halaman 231-235.
10. Development Performance of Agriculture and Fisheries as Leading Program of Local Government and their Impact on People's Lives in Gorontalo Province, Indonesia. Vol. 5 Issue 2, Dec 2017. DOI: 10.20956/ijas.v5i2.1155. International Journal of Agriculture System. P-ISSN: 2337-9782, E-ISSN: 2580-6815. **Nationally Accredited Journal Decree No. 51/E/KPT/2017.**
11. **Determinants Factors of Agricultural Extension Services Performance and Impacts on Farmers' Behavior.** Volume 12, Issue 1 Pages 33-38 DOI : 10.3844/ajabssp.2017.33.38. *American Journal of Agricultural and Biological Sciences.* Science Publications.

Buku yang pernah diterbitkan Kinerja Penyuluh Pertanian Penerbit Deepublish tahun 2016. Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Indonesia penerbit Ideal Publishing tahun 2015. Tahun 2014. Ketahanan Pangan dan Pencerdasan Anak Bangsa "Tulisan pada Buku Cakrawala Perubahan. Merangkai Gagasan, Kebijakan dan Harapan" Universitas Negeri Gorontalo. Tahun 2011 - 2014. Bahan Ajar Kewirausahaan dan Bahan Ajar Penyuluhan dan Komunikasi penerbit Ideas Publishing Gorontalo tahun 2018. Konsultan pada Proyek Environmental Governance and Sustainable Livelihoods Programs (EGSLP) (CIDA-Canada) Gorontalo. Peserta pada kunjungan kerjasama Universitas Negeri Gorontalo dengan Ehime University Jepang di Matsuyama, tahun 2016 dan 2018, Peserta pada kunjungan kerjasama Universitas Negeri Gorontalo dengan PUM Nederland Belanda di Den Haag tahun 2017. Korespondensi by email:mohamadikbalbahua@gmail.com. mohamad.bahua@ung.ac.id. <https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=3b-F0JGqU7gC>